

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 – 2021



RENSTRA

NIAS BARAT
2016



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Onolimbu-Lahomi Kab. Nias Barat
Nias Barat - 22863

Kata pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang telah memberikan RahmatNya kepada kita semua. Dan tak lupa mengucapkan terimakasih kami Tim Penyusun Renstra pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nias Barat telah menyelesaikan pekerjaan untuk menyusun Renstra Tahun 2017-2021 dapat disusun dengan baik acuan atau paduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan dan langkah awal untuk pelaksanaan dan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2017-2021.

Besar harapan kami, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Nias Barat yang lebih terarah, efektif, dan berdaya guna untuk meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Nias Barat.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Barat tahun 2017-2021 untuk dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat mencapai sasaran dan target kinerja. Dan capaian itu untuk bisa mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu : “Menuju Kabupaten Nias Barat Berdaya”. Dengan motto : “HASAMBUA”

Demikian Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika telah tersusun. Dan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra ini.

Onolimbu, Oktober 2016
Tim Perumus Penyusun Renstra

Drs. YOSAFATI HIA, MM

Drs. TURUNA GULO,MM

ARLIS ARIF DOMO, SE

SOLIFATI GULO, S.Kom,MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Komunikasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dinas Komunikasi Dan Informatika
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara
- 3.4 Telaah RTRW
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 4.3 Strategi Dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

TABEL-TABEL

LAPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) R.I No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan merujuk pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya Rencana Strategis (Restra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dijadikan masukan dalam menyempurnakan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk di tingkat SKPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Renstra tersusun mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Nias Barat tahun 2017-2021 dan sekaligus untuk mendukung mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Nias Barat yaitu Menuju Kabupaten Nias Barat Berdaya.

Selain itu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat juga berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Tingkat nasional juga berpedoman dan mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Selain itu menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Barat tahun 2017-2021 yang tertuang di dalam dua (2) arah Sasaran yang terkait dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika dari beberapa Sasaran RPJPD.

Pertama : "Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Nias Barat yang baik dan bersih serta demokratis berlandaskan hukum"

Dengan peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan :

- a) Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab dan terlembaga serta serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis;
- b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen;
- c) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;
- d) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di wilayah Kabupaten Nias Barat untuk memudahkan proses sosialisasi dan transparansi kebijakan;

Kedua : "Terwujudnya sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktivitas"

- a) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;
- b) Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemerataan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;
- c) Meningkatkan peran media massa dan *cyber-media* yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif;
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi sehingga dalam aspek pelayanan publik sudah tidak perlu lagi temu muka antara pelayan dan yang terlayani.
- e) Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan Teknologi Informasi.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat. Juga menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut telekomunikasi.

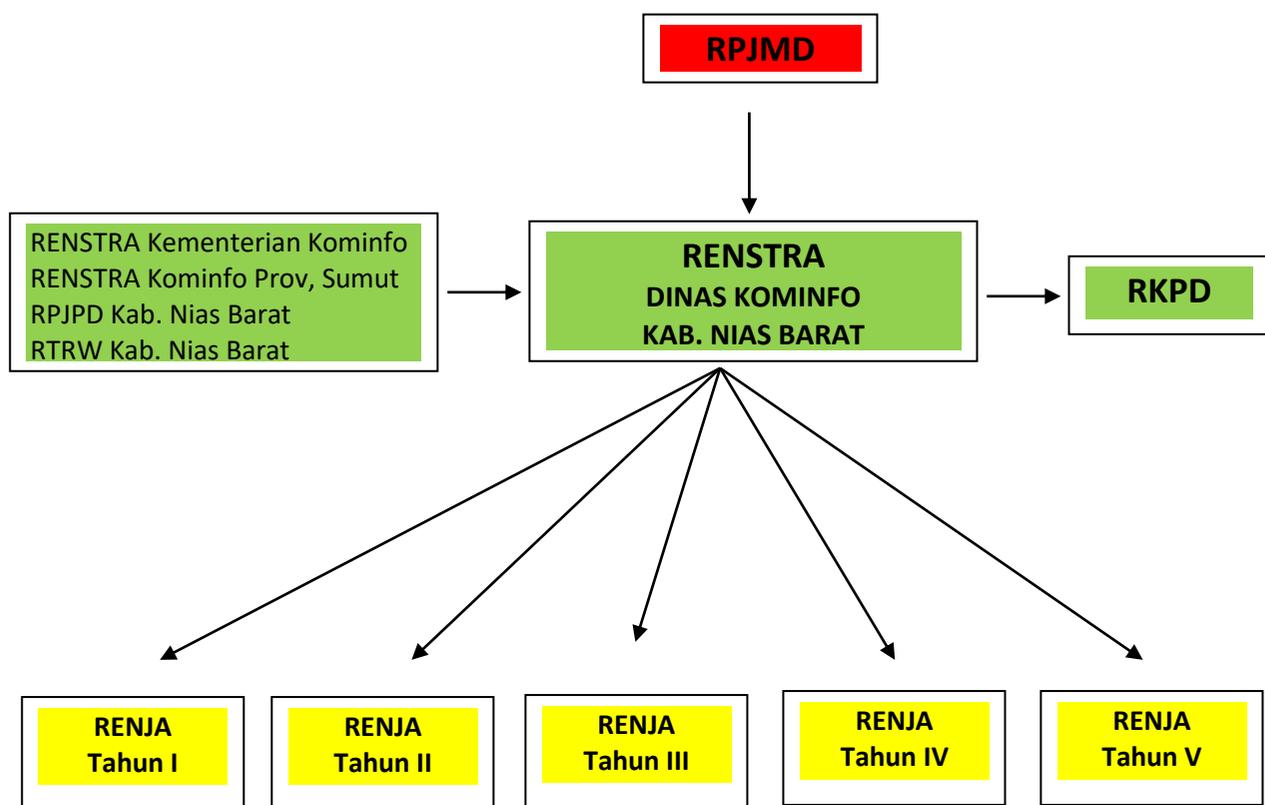
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sedangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang didalam mengatur tentang hak dan kewajiban Pemerintah daerah, mengatur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur DPRD dan mengatur KPUD.

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dengan Dokumen Perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang RI Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos;
10. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
11. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran;
12. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7930);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2016 tentang Penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat di daerah;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Keputusan Menkominfo Selaku Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Nomor : 08/Kep/M.Kominfo/02/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja penyusun Pedoman Tata Pamong Teknologi Informasi Komunikasi (IT Governance);
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Nasional;

29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang REGISTRAR Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
33. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
34. Peraturan Lembaga Sandi Negara nomor 8 Tahun 2016 tentang hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian;
35. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
36. Peraturan Daerah Nias Barat....
37. Peraturan Bupati Nias Barat.....

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat adalah untuk memberikan pedoman atau landasan dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat 2017-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- b. Mewujudkan kesinergian di antara unit-unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan para pemangku kepentingan di lingkungan Kabupaten Nias Barat perihal program dan kegiatan selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar Belakang penyusunan Renstra. Landasan Hukum yang menjadi dasar dan yang melandasi Renstra. Maksud dan Tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat. Telaahan Rencana serta Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini Menyajikan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Strategi dan Kebijakan.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini Menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini Menyajikan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 43 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya secara hirarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
- d. Bidang Penyelenggara e-Government
- e. Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada Pasal disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi dibidang kebijakan teknis aplikasi telematika, pendapat umum hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi, pos telekomunikasi, data informasi dan bina media massa serta tugas pembantuan.

Untuk itu melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan bina media massa;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, diseminasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan bina media massa;
3. Penyelenggaraan pemberian perijinan di bidang komunikasi informasi dan telematika;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informasi dan telematika;
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informasi dan telematika;
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program aplikasi telematika, pendapat umum dan hubungan kelembagaan, sarana komunikasi diseminasi dan informasi, pos dan telekomunikasi;
- f. Menyelenggarakan pembelian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai komunikasi dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

B. Sekretaris

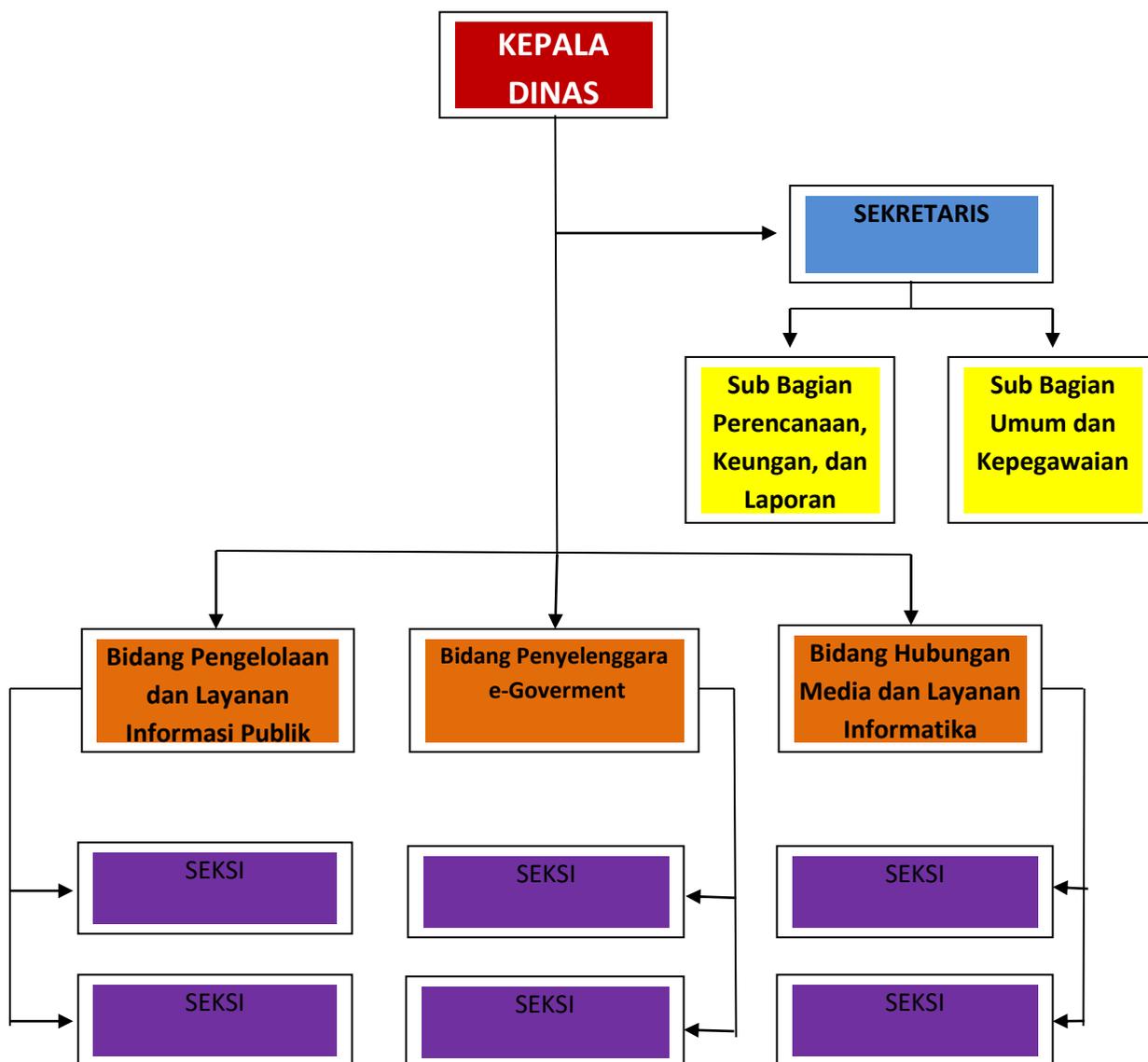
Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan program kerja pada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;
- b. Menyelenggarakan pembagian tugas kepada kepala sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Program, sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- c. Menyelenggarakan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan/umum, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan penataan organisasi ketatalaksanaan, hukum dan penusunan program, monitoring dan evaluasi;
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang kerumahtanggaan/umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program jangka menengah, tahunan Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;

- h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- i. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan;

2.1.2 Adapun Struktur Organisasi Dinas dan Informatika Kabupaten Nias Barat

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yang **Intern** antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kekuatan SDM dapat terurai sebagai berikut dibawah ini.

1. Pegawai Negeri Sipil	Jumlah =	Orang
Berdasarkan Golongan		
- Golongan IV	=	Orang
- Golongan III	=	Orang
- Golongan II	=	Orang
- Golongan I	=	Orang
Berdasarkan Pendidikan Formal		
- Tamat S2	=	Orang
- Tamat S1	=	Orang
- Tamat SMA sederajat	=	Orang
- Tamat SMP sederajat	=	Orang
Berdasarkan Pendidikan Struktural		
- Lulus ADUM	=	Orang
- Lulus Diklatpim III	=	Orang
- Lulus Diklatpim II	=	Orang
2. Pegawai Tidak Tetap		
Jumlah	=	Orang
Pendiikan Formal		
- Tamat S1	=	Orang
- D3	=	Orang
- D1	=	Orang
- Tamat SMA sederajat	=	Orang
3. Pegawai Outsourcing (SK Kepala Dinas)		
- Pada Radio Suara Pasuruan	=	Orang
- Pada Tabloid Suara Pasuruan	=	Orang
- Pada Telecenter	=	Orang
- Tenaga Cleanning Service	=	Orang

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Kendaraan Bermotor
 - Mobil Dinas : Buah
 - Mobil Operasional : Buah
 - Sepeda motor : Buah
2. Tehnologi Informasi dan Komunikasi
 - Jaringan komunikasi E.Gov dengan ditunjang tower 30 unit telah terhubung SKPD/Bagian.
 - Pelayanan Internat Telecenter 1 Unit di Tutur
 - Web site Pemerintah Kabupaten Nias Barat
 - Jaringan Stremming Radio Suara Kabupaten Nias Barat dan CCTV di Pertigaan Purwosari
 - Jaringan Internet
3. Studio Radio Suara Pasuruan
 - Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun ang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.

- 4. Kamera
 - Kamera foto : Buah
 - Kamera video : Buah
- 5. Komputer
 - Komputer PC : Buah
 - Laptop : Buah

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang **Ekstern**, antara lain :

1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sampai Tahun 2021 jumlah KIM telah mencapai 106 kelompok yang tersebar di 24 Kecamatan.
2. Sumber Daya Kesenian Tradisional
Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kelompok kesenian dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat melalui pertunjukan rakyat.
3. Sumber Daya Media massa Elektronik dan Cetak.
Media massa Elektronik seperti Televisi nasional /lokal.
Dengan kerjasama dengan lembaga penyiaran televisi lokal dan nasional
Media massa elektronik seperti radio.

Selain Radio milik Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika kerjasama dengan siaran radio lokal di Kabupaten Nias Barat. Siaranradio non pemerintah sebanyak 3 stasiun radio.

Media massa Cetak seperti Surat kabar, tabloid dan majalah.

Diperlukan kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang beredar di Kabupaten Nias Barat, walaupun Dinas Komunikasi sudah memiliki tabloid Suara Nias Barat yang akan direncanakan untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi majalah. Surat kabar harian maupun mingguan dan dwi mingguan yang beredar di Kabupaten Nias Barat sebanyak 20 surat kabar.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
Sampai Akhir tahun 2016 belum terbentuk Kelompok KIM
2. Pembuatan Leaflet
Belum Pernah dilaksanakan
3. Dialog interaktif dan dialog publik target sebesar 12 kali per tahun tercapai 64 kali sehingga capaian 533,33 persen. Belum Pernah dilaksanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagaimana dijelaskan di awal, pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Nias Barat secara umum dikatakan belum memenuhi harapan masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks.

Hal ini tentunya berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih. Kemajuan tersebut seyogianya harus mampu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Namun, berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif.

Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan / kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan adaptif. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD, di antaranya :

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Nias Barat yang mengarah kepada “daya saing”.
- b. Pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor belum maksimal, baik dalam lingkup SKPD, Kabupaten / Kota maupun masyarakat, khususnya dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).
- c. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengembangan TIK masih rendah, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.
- d. Sikap proaktif masyarakat terhadap pengembangan dan pemberdayaan TIK belum optimal.

Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dalam upaya pengembangan pelayanan informasi, seperti :

- a. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat sebagai Pusat Data (data center) dalam pengelolaan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Network Operating Center (NOC) dan sekaligus diharapkan sebagai konsultan perencanaan bidang komunikasi dan informatika bagi Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai modal utama dalam percepatan arus pertukaran dan diseminasi informasi antar SKPD, Pemerintah Kabupaten seperti: Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Akses Internet dan Intranet;
- c. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan TIK melalui program Universal Service Obligation (USO);

- d. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan TIK mulai berkembang yang diharapkan dapat mendongkrak “daya saing” perekonomian Kabupaten Nias Barat;
- e. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.
- f. Tersedianya dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI.
- g. Terlaksananya pemberdayaan untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat,
- h. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal,

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat tahun 2017-2021 mengemukakan beberapa Sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat yang terkait dengan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat antara lain :

- a. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media.
- b. Terlaksananya pemberdayaan potensi lembaga komunikasi masyarakat
- c. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan ketrampilan bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat.
- d. Tersedianya aplikasi pendukung e-government.
- e. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.
- f. Pengembangan komunikasi dan Informasi dan Media Masa
- g. Pengkajian dan Penelitian Bidang komunikasi dan Informasi.
- h. Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
- i. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi
- j. Program Peningkatan Pengelolaan Persandian
- k. Program pengembangan data / informasi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat tahun 2017-2021 dimana mengungkapkan posisi strategis dan pentingnya penguasaan TIK (Tehnologi Informasi dan Komunikasi) serta koridor- koridor yang perlu untuk dijaga.

Dari perkembangan program kegiatan yang terlaksana pada renstra tahun 2017-2021 dan berdasarkan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika serta RTRW Kabupaten Nias Barat, maka Tantangan dan Peluang adalah sebagai berikut :

NO	PELUANG	NO	TANTANGAN
1	Semakin maju dan berkembangnya TIK	1	Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
2	Adanya berbagai ragam media informasi	2	Lemahnya jaringan informasi
3	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	3	Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi dengan baik
4	Wawasan dan pengetahuan masyarakat Meningkat	4	Adaptasi perkembangan TIK lambat

Tabel 1.1 Peluang dan Tantangan

Pengembangan pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan ditingkatkan dengan pembentukan PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Pemerintahan Kabupaten Niasn Barat dan akan disosialisasikan untuk adanya PPID di setiap SKPD. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi akan disusun SOP (Standar Operasional Prosedur).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan berbagai perkembangan yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir sejak adanya Bidang Komunikasi dan Informatika bergabung menjadi 1 (satu) Dinas dengan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Nias Barat, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai salah satu tugas pokok Dinas komunikasi dan informatika, dapat diidentifikasi dua hal yaitu: (1) masih adanya kesenjangan akses informasi dan pengetahuan dalam masyarakat, dan (2) masih belum optimalnya penyediaan konten informasi dan pengetahuan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Kesenjangan dalam hal akses informasi dalam masyarakat terjadi terutama karena faktor ekonomi. Anggota masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi memiliki perangkat komputer atau telepon genggam (smart phones) dan koneksi internet sendiri, sedangkan yang kurang mampu diperkirakan ada yang memiliki akses terbatas dan yang sama sekali tidak memiliki akses internet. Kesenjangan ini akan semakin besar mengingat bahwa masih adanya penduduk yang tergolong miskin dari seluruh penduduk Kabupaten Nias Barat.

Penyediaan konten informasi dan pengetahuan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang belum optimal terjadi karena unsur-unsur pemerintahan belum seluruhnya memiliki Konten Informasi dan pengetahuan dalam situs-situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Oleh karena SKPD belum memiliki Website sebagai Sub domain. NiasBarat kab.go.id . Informasi dan pengetahuan tentang berbagai program dan kegiatan Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada khususnya diperkirakan tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena tidak tersedia setiap saat dalam,

situs-situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan akan menjadi rendah.

Selain permasalahan kesenjangan akses dan belum optimalnya konten informasi dan pengetahuan seperti dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Nias Barat belum banyak mengembangkan pelayanan publik *online*. Penyediaan layanan *online* atau yang

lebih dikenal dengan sebutan *e-Government* sudah diakui di seluruh dunia mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. *e-Government* sebagai sarana untuk menciptakan *good governance*, sudah menjadi tuntutan masyarakat perkotaan saat ini untuk memperoleh layanan pemerintah yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif.

Berkaitan dengan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Nias Barat harus memiliki dua hal yaitu: (1) infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang efisien dan ekonomis, dan (2) sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam penanganan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terdiri dari antara lain pusat data dan jaringan intranet yang handal harus disediakan secara terpusat dan terintegrasi untuk melayani kebutuhan semua unit kerja Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nias Barat. Sumber daya manusia untuk penanganan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diperlukan baik pada tingkat pusat (dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat) maupun pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan (Kekuatan dan Kelemahan)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Kabupaten Nias Barat terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika. Berdasarkan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan pada periode sebelumnya, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan Peluang seperti terlihat masing-masing pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4.

Tabel 1. 1. Kekuatan Diskominfo Kabupaten Nias Barat

No.	Indikator
1.	Adanya SDM yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang komunikasi dan informatika
2.	Adanya sejumlah aset termasuk gedung, peralatan, dan kendaraan operasional yang kapasitasnya masih dapat ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika
3.	Tersedianya anggaran
4.	Adanya perencanaan
5.	Adanya kewenangan dan alokasi pembiayaan yang diberikan untuk mengurus atau menangani berbagai jenis pelayanan dalam sektor komunikasi dan informatika dalam lingkup Kabupaten Nias Barat

Tabel 1. 2. Kelemahan Diskominfo Kabupaten Nias Barat

No.	Indikator
1.	Belum memadainya kapasitas sejumlah pegawai dalam menangani pekerjaan dalam bidang aplikasi teknologi informasi dan konten informasi di lingkungan Kabupaten Nias Barat.
2.	Masih rendahnya tingkat kepercayaan (reputasi) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan berbagai pelayanan Teknologi Informasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
3.	Belum tersedianya jaringan intranet Kabupaten Nias Barat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyampaian informasi dan mengurangi kesenjangan pemerolehan informasi di antara penduduk Kabupaten
4.	Masih belum adanya pusat data (data center) pemerintah kabupaten nias barat dan dapat mengurangi tingkat efisiensi dalam manajemen dan operasional
5.	Masih rendahnya komitmen sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam mengembangkan konten informasi berjejaring baik yang secara alami sangat diperlukan oleh penduduk, maupun yang secara fungsional merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk mendiseminasikannya dalam rangka membangun kemitraaan antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kabupaten Nias Barat
6.	Masih rendahnya komitmen sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam mengembangkan sistem informasi/teknologi informasi (SITI) sebagai <i>back office</i> untuk penyediaan pelayanan publik <i>online</i> .
7.	Prasarana dan sarana masih belum memadai
8.	Anggaran masih belum mencukupi

Tabel 1.3. Tantangan Diskominfo Kabupaten Nias Barat

No.	Indikator
1.	Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
2.	Lemahnya jaringan informasi
3.	Kurang sadar informasi
4.	Adaptasi perkembangan TIK lambat

Tabel 1.4. Peluang Diskominfo Kabupaten Nias Barat

NO.	Indikator
1.	Semakin maju dan berkembangnya TIK
2.	Adanya berbagai ragam media informasi
3.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

Dari formulasi SWOT di atas faktor internal maupun eksternal dapat di analisis sebagai berikut :

1. dengan adanya SDM, sarana dan prasarana dapat memanfaatkan kemajuan TIK
2. dengan adanya kelompok informasi masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya informasi

3. peningkatan sarana dan prasarana untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan TIK
4. Dalam Penyabaran informasi perlu ditunjang adanya berbagai media Informasi dan Komunikasi baik yang berbasis teknologi informasi maupun yang tradisional
5. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan sadar informasi di masyarakat.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat

1. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat

Terkait Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Sebelum dilakukan telaahan tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat terkait dengan Visi, Misi, dan Program Bupati Nias Barat, perlu ditegaskan kembali makna kata “komunikasi” dan “informatika” yang melekat pada bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dapat berlangsung jika terdapat komponen-komponen berikut: (1) pengirim (komunikator), (2) pesan (informasi), (3) saluran, (4) penerima, (5) umpan balik (tanggapan penerima), dan (6) protokol (aturan berkomunikasi).

Dalam konteks pemerintahan, terdapat dua model komunikasi yaitu kemitraan internal dan kemitraan eksternal yang biasanya berlangsung secara timbal-balik atau dua arah. Dalam kemitraan internal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal (*Government to government* (G2G) dan antara pemerintah dengan pegawai (*Government to Employees* (G2E); sedangkan dalam kemitraan eksternal komunikasi berlangsung antara pemerintah dengan anggota masyarakat (*Government to Citizens* (G2C), pemerintah dengan dunia usaha (*Government to Bussinnes* (G2B), dan pemerintah dengan organisasi nirlaba (*Government to Nonprofit* (G2N).

Informatika sendiri memiliki makna lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer. Dalam lingkup yang lebih luas, informatika mencakup: (1) konsep informasi; (2) pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, temu-kembali, dan diseminasi informasi; (4) penggunaan teknologi informasi (TI); (5) keamanan informasi; dan (6) informatika sosial (kajian aspek sosial dari TI).

Visi Kabupaten Nias Barat 2017-2021:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Periode 2017-2021, yang selanjutnya menjadi Visi daerah Kabupaten Nias Barat yaitu "NIAS BARAT BERDAYA" Dengan motto "HASAMBUA"

Arti dari sebuah VISI ialah :

- Merupakan suatu rumusan yang menginginkan adanya perubahan disemua sektor melalui suatu komitmen dan dukungan semua elemen masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan;
- Nias Barat adalah meliputi seluruh wilayah administrasi Nias Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2008;

- Berdaya adalah menunjukkan adanya kekuatan, tenaga, pengaruh, akal dan jalan keluar/solusi;

Misi Kabupaten Nias Barat 2017-2021:

- a. Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Nias Barat;
- b. Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme;
- c. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah;
- d. Menyelenggarakan tata ruang Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas Kota yang semakin modern dan berkelanjutan;
- e. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan; dan
- f. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinnekaan.
- g. Pembangunan Sarana Prasarana lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran.
- h. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana komunikasi informatika dan persandian.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa komunikasi dan informatika adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan, ibarat sebuah koin dengan dua sisi yang berbeda. Oleh karena itu, di satu sisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat berperan untuk memastikan bahwa berlangsungnya komunikasi antara Pemerintah dengan penduduk, pelaku usaha, organisasi nirlaba, pegawai pemerintah, dan pemerintahan lain. Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat juga berperan untuk memastikan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan berbagai pihak yang disebutkan di atas berlangsung secara efisien dan efektif melalui berbagai saluran atau menggunakan berbagai media yang memungkinkan untuk itu.

Selanjutnya dapat disebutkan bahwa secara umum tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat adalah menyampaikan informasi pembangunan kepada semua anggota masyarakat dan sekaligus mendapatkan masukan dari mereka. Dengan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien antara Pemerintah Kabupaten dengan anggota masyarakat maka akan tercipta suatu model pembangunan partisipatif yang merupakan salah satu persyaratan pembangunan yang berhasil baik dalam era demokrasi saat ini. Hal ini juga merupakan misi pertama pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Barat 2017-2021.

Sesuai dengan perkembangan mutakhir di bidang teknologi informasi dan penggunaan teknologi berjejaring (networked technology) sudah terbukti merupakan cara yang paling efisien dan efektif untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, Dinas komunikasi

dan informatika Kabupaten Nias Barat harus berperan lebih besar untuk memastikan tersedianya infrastruktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten yang memadai untuk mendukung proses komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan seluruh mitranya. Hal ini juga sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Nias Barat untuk menyediakan infrastruktur kota yang modern.

Peran dalam memastikan penyediaan infrastuktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten Pemerintah Kabupaten Nias Barat menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan agenda Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Peran ini menuntut Dinas komunikasi dan informatika harus dapat bekerjasama lebih erat dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan konten atau muatan informasi dan pengembangan sistem informasi/teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang modern secara *online*. Hal ini sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk menumbuh kembangkan keharmonisan dan persatuan dalam bermasyarakat .

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Ada sejumlah faktor yang diperkirakan sebagai penghambat dalam pelayanan komunikasi dan informatika di lingkungan kabupaten yaitu :

- a. Rendahnya komitmen para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengembangkan konten elektronik yang komprehensif berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
- b. Rendahnya kesadaran dan komitmen para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan situs web dan perangkat lunak aplikasi dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan publik *online* bagi setiap segmen masyarakat kabupaten Nias Barat.
- c. Rendahnya dukungan dan komitmen para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menempatkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang sesuai untuk secara berkelanjutan mengupayakan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada unit kerja masing-masing.

Faktor-faktor pendorong pelayanan komunikasi dan informatika di lingkungan Kabupaten Nias Barat dapat diidentifikasi antara lain adalah seperti berikut :

- a. Adanya visi untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera, dan berdaya di mana peran pelayanan komunikasi dan informatika untuk mewujudkannya adalah sangat besar. Multikulturalisme harus dipahami dengan benar oleh setiap individu sehingga perlu disosialisasikan secara luas bagaimana keanekaragaman budaya tersebut

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten. Kabupaten yang berdaya saing adalah kabupaten yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif untuk peningkatan efisiensi di semua sektor kehidupan masyarakat. Kabupaten yang humanis, sejahtera dan berdaya pada akhirnya akan terwujud dengan terciptanya kehidupan yang harmonis, aman dan berkeraturan.

- b. Terjadinya peningkatan dramatis perkembangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah kabupaten Nias Barat dan peningkatan penggunaan perangkat bergerak (mobile) oleh penduduk untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan serta pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Nias Barat.

C. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Nias Barat

1. Faktor-faktor Penghambat

Ada sejumlah faktor yang diperkirakan dapat menjadi penghambat pengembangan pelayanan komunikasi dan informatika di lingkungan Kabupaten Nias Barat, antara lain seperti berikut :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Barat untuk pelayanan publik baik secara vertikal maupun horizontal masih rendah, sebagian besar masih mengandalkan layanan tatap muka (face to face). Hal ini menyebabkan pengembangan pelayanan transaksi *online* tidak menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektor.
- b. Belum adanya model pelayanan transaksi *online* dalam sektor tertentu di lingkungan pemerintahan menyebabkan rendahnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang murah, mudah dan transparan.
- c. Minimnya pengembangan aplikasi pelayanan publik secara terpusat dan minimnya tuntutan pemerintah pusat terhadap pemerolehan data melalui pemerosesan seketika (real time) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik *online*. Hal ini menyebabkan kurang terdorongnya unsur pemerintahan di daerah untuk mengembangkan pelayanan publik *online*.

2. Faktor-faktor Pendorong

Terlepas dari hambatan-hambatan seperti dikemukakan di atas, sebenarnya pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai landasan hukum sebagai pendorong ke arah pengembangan pelayanan publik *online* walaupun penerapannya di daerah terasa sangat lambat. Peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- c. Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- d. Permenpan No. 6/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Elektronik di lingkungan Pemerintah;
- e. Kepmenpan No. 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Surat Edaran Menkominfo No. 1/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara;

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkaitan dengan penataan ruang, Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antar daerah di Sumatera Utara khususnya yang bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Nias Barat diharapkan akan tercapai.

Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat belum melakukan telaahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan sebagai salah satu dasar pembangunan wilayah Kabupaten Nias Barat khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Metode Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dalam Renstra ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika kepada penduduk Kabupaten Nias Barat selama lima tahun terakhir. Selain itu, penentuan isu-isu tersebut juga didasarkan pada kecenderungan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan akan berdampak pada pelayanan yang harus diberikan dalam lima tahun mendatang.

2. Hasil Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika, diidentifikasi berbagai isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori yaitu: (1) penurunan kesenjangan akses

informasi dan pengetahuan; (2) peningkatan penyediaan konten informasi dan pengetahuan; (3) peningkatan penyediaan pelayanan publik *online*; (4) peningkatan kapasitas dan kehandalan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (6) peningkatan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif (tradisional).

- a. Guna mewujudkan penurunan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Nias barat, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
 - 1) Masih belum tersedianya fasilitas akses internet gratis bagi penduduk yang tergolong kurang mampu secara ekonomi; dan
 - 2) Masih belum adanya jaringan intranet Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi akses internet gratis bagi penduduk;
- b. Guna mewujudkan peningkatan penyediaan konten informasi dan pengetahuan berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, tantangan yang dihadapi antara lain adalah :
 - 1) Masih rendahnya pemanfaatan situs web sebagai media untuk mendiseminasikan informasi dan pengetahuan oleh dan tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 2) Masih rendahnya jumlah informasi dan pengetahuan yang diciptakan untuk dimuat di situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 3) Masih belum tersedianya aplikasi versi bergerak (*mobile*) dari situs-situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
- c. Guna mewujudkan peningkatan penyediaan pelayanan publik *online* dalam bentuk transaksi *online*, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
 - 1) Masih rendahnya pemahaman atau komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan transformasi pelayanan dari cara manual ke bentuk *online*;
 - 2) Masih belum ditunjuknya *Chief Information Officer* (CIO) untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Nias Barat;
 - 3) Masih belum tersedianya dokumen Rencana Induk Master plan pengembangan TIK dan e-Government Pengembangan (RIP) *e-government* Kabupaten Nias Barat yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya; dan
 - 4) Masih belum adanya upaya pengembangan berbagai Aplikasi dan database untuk menunjang sistem informasi Kabupaten Nias Barat.
- d. Guna mewujudkan peningkatan kapasitas dan kehandalan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
 - 1) Belum tersedianya jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic* (FO)) untuk menghubungkan seluruh gedung/fasilitas Pemerintah Kabupaten;
 - 2) Masih belum adanya server hingga saat ini oktober 2016 di kabupaten Nias Barat;

- 3) Masih rendahnya kapasitas *bandwidth* internet yang dilanggan;
 - 4) Masih rendahnya tingkat kehandalan pusat data karena belum tersedianya sistem cadangan; dan
 - 5) Masih belum terpenuhinya standar minimal fisik ruang pusat data.
- e. Guna mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
- 1) Masih kurangnya tenaga spesialis bidang jaringan dan database untuk menangani manajemen dan operasional pusat data dan jaringan;
 - 2) Masih kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga pengembangan dan pemeliharaan situs-situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 3) Masih kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga pengembangan konten informasi dan pengetahuan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 - 4) Masih rendahnya pemahaman para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer.
- f. Guna mewujudkan peningkatan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah :
- 1) Masih sedikitnya jumlah papan informasi (teks berjalan dan layar monitor/billboard) yang tersedia;
 - 2) Masih rendahnya jumlah eksemplar media cetak (tabloid, brosur, leaflet, pamflet, spanduk, dan baliho) yang diterbitkan; dan
 - 3) Masih rendahnya keterlibatan dalam kegiatan promosi (pameran, dialog interaktif, ceramah, dan tatap muka lainnya).

BAB IV

4. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Pernyataan Visi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat adalah :

“NIAS BARAT BERDAYA DALAM MEMANFAATKAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA”

Nias Barat Berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informatika bermakna bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat menginginkan bahwa Nias Barat menjadi yang terkemuka dalam hal pengambilan manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan bermutu kepada seluruh unsur atau para pemangku kepentingan Kabupaten Nias Barat.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat harus menjadi fasilitator penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang intensif dan penciptaan konten informasi yang masif bagi seluruh unsur Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi Nias Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata di Sumatera Utara yang berbudaya, Berdaya saing, Humanis, Sejahtera dan Religius.

Menjadi fasilitator penggunaan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang intensif dan penciptaan konten informasi yang masif berarti bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi dan menginisiasi dua hal yaitu: (1) pengembangan aplikasi sistem informasi dan (2) penciptaan konten bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Pengembangan aplikasi akan didukung dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk pusat data, jaringan intranet dan *bandwidth* internet, perangkat lunak dasar untuk pengembangan aplikasi, pelatihan, panduan dan standarisasi, dan bantuan konsultasi. Penciptaan konten akan didukung dengan penyediaan dokumen perencanaan (e-government plan), pelatihan, konsultasi, dan berbagai panduan dan standarisasi konten.

B. Pernyataan Misi

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat adalah :

a. Menurunkan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan di dalam masyarakat;

- b. Mendorong peningkatan penciptaan dan penyediaan konten informasi pengetahuan oleh dan tentang Kabupaten Nias Barat;
- c. Menyediakan berbagai perangkat lunak aplikasi pelayanan publik dalam bentuk transaksi *online*;
- d. Mengembangkan jangkauan, kapasitas dan kehandalan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah ;
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- f. Mengembangkan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif selain berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Kaitan antara misi dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Misi 1	Tujuan	Sasaran
Menurunkan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan di dalam masyarakat	Meningkatkan kecerdasan, kreativitas, inovasi dan daya saing seluruh penduduk	1) Tersedianya kiosk-kiosk Warung Informasi Masyarakat (WIM) akses internet gratis di gedung / bangunan milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat bagi penduduk 2) Terbentuknya sistem manajemen dan operasional pelayanan internet gratis
Misi 2	Tujuan	Sasaran
Mendorong peningkatan penciptaan dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan yang optimal oleh dan tentang Kabupaten Nias Barat	Meningkatkan partisipasi, investasi, keharmonisan dan kesatuan masyarakat dalam pembangunan	Tersedianya konten informasi dan pengetahuan tentang dan oleh Kabupaten Nias Barat: (1) Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; (2) Bangunan bersejarah; (3) Cagar budaya; (4) Obyek wisata; (5) Potensi investasi; (6) Produk unggulan; (7) Usaha kecil dan menengah (UKM); (8) Kreativitas dan inovasi masyarakat; (9) Pendidikan; (10) Kesehatan;

		(11) Peraturan perundang - undangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); (12) Kependudukan; (13) transportasi publik; dan lainnya
Misi 3	Tujuan	Sasaran
Menyediakan berbagai perangkat lunak aplikasi pelayanan publik dalam bentuk transaksi <i>online</i>	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha dan pegawai Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya berbagai perangkat lunak aplikasi untuk pelayanan transaksi <i>online</i> pada berbagai unit kerja 2) Tersedianya perangkat lunak sistem manajemen database untuk menunjang sistem informasi 3) Tersedianya versi bergerak berbagai aplikasi web yang ada 4) Tersedianya dokumen e-Government Plan Kota beserta peraturan pelaksanaannya 5) Ditetapkannya Chief Information Officier (CIO) untuk memimpin pengembangan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota
Misi 4	Tujuan	Sasaran
Mengembangkan jangkauan, kapasitas dan kehandalan infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah	Memfasilitasi pengembangan dan pengoperasian berbagai sistem informasi dan pelayanan berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya jaringan kabel serat optik atau Fiber Optic (FO) sebagai intranet untuk menghubungkan seluruh gedung / fasilitas Pemerintah Kabupaten Nias Barat 2) Tersedianya berbagai perangkat keras dan lunak Pusat Data yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung semua pelayanan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 3) Tersedianya kapasitas <i>bandwidth</i> internet yang memadai untuk keperluan progam Pemerintah Kabupaten Nias Barat sampai ke kecamatan

		<p>4) Tersedianya ruang fisik Pusat Data Cadangan untuk meningkatkan kehandalan pelayanan sistem informasi</p> <p>5) Terintegrasinya seluruh Sistem TI</p>
Misi 5	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mendukung pengembangan dan pengoperasian pelayanan berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang prima dan berkelanjutan	<p>1) Tersedianya tenaga spesialis bidang jaringan dan database untuk penganganan manajemen dan operasional Pusat Data</p> <p>2) Tersedianya tenaga yang memiliki kapasitas dalam pengembangan dan pemeliharaan situs web di setiap unit kerja</p> <p>3) Tersedianya tenaga bersertifikasi di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p> <p>4) Meningkatkan pemahaman para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan sistem informasi berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p>
Misi 6	Tujuan	Sasaran
Mengembangkan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif selain berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mendukung diseminasi informasi yang lebih masif dan bervariasi	<p>1) Tersedianya papan informasi dengan jumlah yang memadai</p> <p>2) Tersedianya jumlah eksemplar yang memadai untuk semua media cetak</p> <p>3) Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan promosi</p> <p>4) Pembangunan infrastruktur Radio Siaran Milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat</p> <p>5) Pembentukan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)</p> <p>6) Tersedianya layanan <i>call center</i></p>

Tabel 4.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Dalam mewujudkan **misi pertama** yaitu mengupayakan penurunan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan di dalam masyarakat, maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nias Barat antara lain adalah:

- a. Mengidentifikasi, memetakan, dan menetapkan prioritas kawasan pemukiman penduduk miskin sebagai kelompok sasaran pelayanan
- b. Menetapkan jenis layanan yang akan disediakan apakah dalam bentuk tetap atau bergerak
- c. Menyusun skema pembiayaan bertahap setiap lima tahun sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia
- d. Mengupayakan terbitnya Peraturan Bupati yang mendukung penyelenggaraan pelayanan
- e. Mengembangkan kerjasama dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat baik untuk lokasi pelayanan maupun pengawasan dan pemeliharannya
- f. Membuat dokumen panduan operasional penyelenggaraan pelayanan dan tata tertib penggunaan layanan oleh penduduk

Dalam mewujudkan **misi kedua** yaitu mendorong peningkatan penciptaan dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan oleh dan tentang Kabupaten Nias Barat, maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nias Barat antara lain adalah :

- a. Mengevaluasi dan memetakan kembali keadaan mutakhir konten web yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- b. Mengembangkan kerja sama dengan unit-unit kerja untuk membangun konten web
- c. Mengadakan pelatihan bagi staf unit kerja baik untuk penciptaan konten maupun pemeliharaan konten situs web
- d. Memberikan supervisi setiap saat kepada unit kerja dalam penciptaan dan pemeliharaan situs web
- e. Mengupayakan terbitnya Peraturan Bupati untuk penunjukan staf yang menangani situs web unit kerja
- f. Mengupayakan pendanaan yang kontinyu untuk tim penanganan situs web unit kerja di lingkungan Kabupaten Nias Barat
- g. Melakukan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap penanganan konten situs web unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk memotivasi unit kerja mengembangkan situs webnya

Dalam mewujudkan **misi ketiga** yaitu membangun berbagai perangkat lunak aplikasi pelayanan publik dalam bentuk transaksi *online*, maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nias Barat antara lain adalah :

- a. Membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) *e-Government* atau Master Plan Pengembangan TIK dan e-Government yang akan dijadikan sebagai panduan arah pengembangan lima tahun ke depan
- b. Mengupayakan terbitnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) *e-Government* atau Master Plan Pengembangan TIK dan e-Government
- c. Mengupayakan penunjukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai Chief Information Officer (CIO) dan menambah Jumlah Personil Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat untuk memimpin pelaksanaan pengembangan *e-government* oleh Bupati
- d. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Bupati tentang perkembangan pencapaian *e-government* secara periodik

Dalam mewujudkan **misi keempat** yaitu mengembangkan jangkauan, kapasitas dan kehandalan infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Nias Barat, maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nias Barat antara lain adalah :

- a. Mengupayakan pemasangan kabel serat optik untuk menghubungkan bangunan kantor / fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat sampai terkoneksi seluruh SKPD di Kecamatan secara bertahap
- b. Menetapkan dan mengembangkan Pusat Data utama dan cadangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
- c. Memastikan kapasitas dan kehandalan semua perangkat keras dan lunak Pusat Data untuk melayani semua kebutuhan dukungan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
- d. Memastikan kapasitas *bandwidth* internet yang cukup untuk melayani semua kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
- e. Mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan semua unit kerja berkaitan dengan operasional semua aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat termasuk pelayanan *hosting*, database, dan pengembangannya

Dalam mewujudkan **misi kelima** yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka strategi yang

akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat antara lain adalah :

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkaitan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan merancang sistem serta melaksanakan pelatihan berkelanjutan sesuai perkembangan kebutuhan
- b. Bekerja sama dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, institusi pendidikan, dan penyedia pelatihan dalam penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
- c. Mengupayakan pendanaan pelatihan yang memadai dan mendorong para staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk memperoleh sertifikasi di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam mewujudkan **misi keenam** yaitu mengembangkan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif selain berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat antara lain adalah :

- a. Bekerja sama dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam memastikan penyediaan perangkat diseminasi informasi dan pengetahuan alternatif
- b. Membuat penjadwalan tahunan yang tetap untuk penyelenggaraan berbagai bentuk diseminasi informasi alternatif
- c. Bekerja sama dengan berbagai mass media dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelayanan diseminasi informasi bagi kelompok-kelompok masyarakat

B. Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan strategi untuk mencapai sasaran pelayanan bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat seperti dikemukakan di atas, ada sejumlah kebijakanyang perlu diambil agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kebijakan yang diperkirakan sangat penting untuk keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, seperti berikut ini.

a. Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih berperan sebagai fasilitator dalam dua hal yaitu penyediaan infrastruktur Tehnologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan. Dalam hal penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi dan Informatika seyogianya diberikan kewenangan tersentralisasi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 untuk mengembangkan dan memelihara (1) jaringan utama intranet Kabupaten Nias Barat, (2) pusat data, (3) penyediaan *bandwidth* internet, dan (4) penyediaan perangkat lunak sistem dan *Database Management Systems* (DBMS) untuk kepentingan seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Hal ini sudah lazim dilakukan di berbagai instansi karena sudah terbukti lebih efisien.

Pemberian kewenangan tersebut melahirkan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pelayanan kepada semua unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Pelayanan yang diberikan antara lain meliputi penyediaan *server* untuk *hosting* (1) semua situs web (*front office*), (2) perangkat lunak aplikasi sistem informasi (*back office*), dan (3) penyimpanan data (*storage*). Tanggung jawab ini juga termasuk pengembangan dan penanganan sistem cadangan (*back-up*) pusat data yang harus dilakukan secara berkala.

Dalam hal penyediaan konten informasi dan pengetahuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat berperan untuk membantu dan menyelia pengembangan perangkat lunak aplikasi baik untuk sistem informasi sebagai *back office* maupun situs web sebagai *front office* yang berfungsi sebagai sarana yang akan digunakan oleh unit-unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyediaan konten informasi dan pengetahuan bagi keperluan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Dengan kata lain, pengembangan berbagai perangkat lunak aplikasi sistem informasi tersebut dilakukan secara terdistribusi dengan kewenangan berada pada unit-unit kerja dengan bantuan supervisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam hal sumber daya manusia yang bekerja di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh agar tetap berkarir di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan kata lain, semua tenaga berketerampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua unit kerja atau

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat tidak dimutasi ke bidang lain tanpa persetujuan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mempersiapkan SDM Pengganti yang bisa meneruskan.

Tenaga kerja berketerampilan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut terdiri dari berbagai keahlian seperti analis dan perancangan sistem, programmer web, programmer aplikasi, administrator jaringan, administrator database, auditor, dan operator berbagai jenis aplikasi. Kebijakan tersebut sangat penting ditetapkan agar proses rekrutmen tenaga kerja tetap yang tidak mudah dilakukan dan pelatihan yang memerlukan waktu dan biaya besar tidak menjadi sia-sia. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pengembangan, manajemen dan operasional semua sistem berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

c. *Perencanaan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*

Semua pengembangan di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah seharusnya didasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah disetujui bersama dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Dokumen tersebut biasanya dikenal dengan nama Rencana Induk Pengembangan (RIP) e-Government atau Master Plan Pengembangan TIK dan e-Government. Dokumen tersebut menjadi penunjuk arah (roadmap) dengan jadwal implementasi yang harus diikuti semua pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam melakukan transformasi ke arah pemerintahan yang baik (good governance) yang dicita-citakan.

Berkaitan dengan implementasi e-Government Plan tersebut, perlu dilakukan penunjukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota sebagai Chief Information Officer (CIO) oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk memimpin rapat dengan semua kepala unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merealisasikan rencana tersebut. Selain itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pimpinan unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk itu, perlu ditetapkan bahwa penerapan *e-government* menjadi salah satu butir penting dalam penilaian kinerja setiap unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

d. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat. Sebagai fasilitator sistem informasi dan/atau teknologi informasi (SI/TI) bagi semua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat, kinerja pelayanan komunikasi dan informatika banyak ditentukan oleh kerja sama tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memungkinkan penggunaan sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk mendukung terlaksananya berbagai program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendiseminasikan informasi dan pengetahuan terutama bagi penduduk Kabupaten Nias Barat. Selain itu, kerja sama juga diperlukan baik dalam pengembangan maupun manajemen dan operasional berbagai Sistem Informasi/Tehnologi Informasi (SI/TI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

e. Dukungan Pendanaan

Dukungan pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan pengembangan Sistem Informasi/Tehnologi Informasi (SI/TI) Kabupaten Nias Barat seharusnya dilihat sebagai investasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. *Good governance* sudah menjadi impian semua orang di seluruh dunia, dan hal itu sudah terbukti hanya dapat diraih dengan melakukan transformasi dari sistem konvensional ke sistem berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *online*. Pelayanan dengan menggunakan transaksi *online* akan berdampak luas bagi masyarakat dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas baik bagi anggota masyarakat yang dilayani maupun bagi pemerintah sebagai penyedia pelayanan. Selain itu, pelayanan seperti itu juga akan menciptakan transparansi pemerintahan dan partisipasi yang tinggi dari anggota masyarakat dalam pembangunan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk menetapkan bahwa pengembangan Sistem Informasi/Tehnologi Informasi (SI/TI) sebagai salah satu program prioritas Kabupaten Nias Barat dalam lima tahun ke depan. Program tersebut selanjutnya didukung dengan pendanaan yang proporsional dalam bentuk persentase dilihat dari besarnya anggaran belanja Kabupaten Nias Barat. Pendanaan pengembangan tersebut dialokasikan sesuai dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti dikemukakan sebelumnya. Dengan kata lain, pendanaan pengembangan dan operasional Sistem Informasi/Tehnologi Informasi (SI/TI) dapat dilakukan secara terdistribusi pada berbagai unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi terkoordinasi dengan baik di bawah Chief Information Officer (CIO) Kabupaten Nias Barat.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam lima tahun ke depan, ada berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk diselenggarakan dalam rangka memenuhi visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat, seperti berikut :

- a. Menyediakan kiosk-kiosk atau Warung Informasi Masyarakat (WIM) untuk akses internet gratis di gedung/bangunan milik Pemerintah Kabupaten Nias Barat bagi penduduk
- b. Mengembangkan sistem manajemen dan operasional pelayanan internet gratis
- c. Mengembangkan konten informasi dan pengetahuan tentang: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Nias Barat; berbagai etnis, bangunan bersejarah dan cagar budaya; berbagai obyek wisata, potensi investasi dan produk unggulan; pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); pendorong kreativitas dan inovasi masyarakat; fasilitas pendidikan dan kesehatan; peraturan perundang-undangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); database kependudukan untuk mendukung semua pelayanan publik Kabupaten Nias Barat; dan portal ticketing semua transportasi publik
- d. Mengembangkan berbagai perangkat lunak aplikasi untuk pelayanan transaksi online pada berbagai unit kerja
- e. Mengembangkan perangkat lunak database untuk menunjang sistem informasi Kabupaten Nias Barat
- f. Mengembangkan versi bergerak berbagai aplikasi web yang sudah ada
- g. Menyusun dokumen Master Plan TIK dan e-Government Kabupaten Nias Barat beserta peraturan pelaksanaannya
- h. Menetapkan Chief Information Officer (CIO) untuk memimpin pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Nias Barat.
- i. Membangun jaringan kabel serat optik (FO) sebagai intranet untuk menghubungkan seluruh gedung/fasilitas Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
- j. Mengembangkan berbagai perangkat keras dan lunak Pusat Data yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung semua pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Nias Barat.
- k. Menyediakan kapasitas bandwidth internet yang memadai untuk keperluan program Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

- l. Mengembangkan ruang fisik Pusat Data Cadangan untuk meningkatkan kehandalan pelayanan sistem informasi
- m. Mengintegrasikan berbagai Aplikasi antar SKPD dan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- n. Menyediakan tenaga spesialis bidang jaringan dan database untuk pengangan manajemen dan operasional Pusat Data
- o. Mengembangkan tenaga yang memiliki kapasitas dalam pengembangan dan pemeliharaan situs web di setiap unit kerja
- p. Mengembangkan tenaga bersertifikasi di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- q. Meningkatkan pemahaman para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan sistem informasi berbasis Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- r. Menyediakan papan informasi dengan jumlah yang memadai
- s. Menyediakan jumlah eksemplar yang memadai untuk semua media cetak
- t. Mengikuti berbagai kegiatan promosi
- u. Membangun Sarana Prasarana Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- v. Membentuk dan Memberdayakan kelompok informasi masyarakat (KIM)
- w. Menyediakan layanan *call center*

B. Indikator Kinerja

1. Tersedianya fasilitas akses internet gratis pada tingkat kecamatan untuk memastikan bahwa penduduk memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan
2. Tersedianya konten informasi dan pengetahuan oleh dan tentang Nias Barat yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah
3. Terjadinya transformasi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari cara tatap muka yang tradisional ke pelayanan publik *online* yang lebih efektif dan efisien
4. Tersedianya infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan kapasitas yang cukup untuk mendukung seluruh kebutuhan Kota baik untuk internal pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada masyarakat
5. Tersedianya SDM dengan berbagai keahlian di bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memastikan terselenggaranya pelayanan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang maksimal di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Nias Barat.
6. Tersedianya media informasi dan pengetahuan alternatif selain dalam bentuk elektronik bagi penduduk

C. Kelompok Sasaran

Ada dua kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat yaitu penduduk Nias Barat dan unit kerja Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dirancang untuk pemberdayaan (empowering) penduduk di satu sisi, dan penguatan (strengthening) unit kerja yang memberikan pelayanan di sisi lainnya.

D. Pendanaan Indikatif

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat untuk lima tahun ke depan disusun seperti terlihat pada Tabel 5.1

Lanjutan Tabel !

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

A. Indikator Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Nias Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Barat adalah seperti terlihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun-0	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah fasilitas akses internet gratis pada tingkat kelurahan untuk memastikan bahwa penduduk yang tergolong ekonomi lemah memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan	0	1	1	1	1	1	
2.	Jumlah konten informasi dan pengetahuan oleh dan tentang Nias Barat yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah	0	1	1	1	1	1	
3.	Jumlah transformasi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari cara tatap muka yang tradisional ke pelayanan publik online yang lebih efektif dan efisien		1	1	1	1	1	
4.	Jumlah infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan kapasitas yang cukup untuk mendukung seluruh kebutuhan Kabupaten Nias Barat baik untuk internal pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada masyarakat		1	1	1	1	1	

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun-0	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Jumlah SDM dengan berbagai keahlian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memastikan terselenggaranya pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang maksimal di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota		2	4	6	8	10	
6.	Jumlah media informasi dan pengetahuan alternatif selain dalam bentuk elektronik bagi penduduk		1	1	1	1	1	

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat tahun 2017– tahun 2021 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Barat yang memuat tentang Program, Kegiatan dan Kebijakan serta Tujuan dan Sasaran.

Renstra digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Tahunan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat dan juga sebagai pedoman penyusunan Renstra yang akan datang.

Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2017-2021 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sekaligus juga bisa mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN : KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 SKPD : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp) 2017			SUMBER DANA	TARGET	Prakiraan Maju Tahun 2018
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURAN			Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7			
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			778.653.170				778.645.868	
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representatif		1 Tahun	540.912.384				540.912.384	
2	Tunjangan Keluarga		1 Tahun	69.354.067				69.354.067	
3	Tunjangan Jabatan		1 Tahun	97.339.125				97.339.125	
4	Tunjangan Fungsional Umum		1 Tahun	14.524.250				14.524.250	
5	Tunjangan Beras		1 Tahun	35.377.875				35.377.875	
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		1 Tahun	21.138.167				21.138.167	
7	Pembulatan Gaji		1 Tahun	7.302					
II	BELANJA LANGSUNG								
1	I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.148.470.000				1.385.780.000	
1	Penyediaan jasa surat -menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	5.000.000				7.500.000	
2	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, telepon dan air minum		20.000.000				22.500.000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	225.470.000				235.780.000	
4	Penyediaan jasa Administrasi Umum	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan (PPA, PPK, PPTK, Bendahara, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang, bantuan intensif bagi Pegawai Non PNS.	1 Tahun	468.000.000				550.000.000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	25.000.000				30.000.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	20.000.000				25.000.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	15.000.000				20.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	70.000.000				80.000.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Tahun	250.000.000				350.000.000	
10	Monitoring /Survey/Pengawasan/Evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas pegawai dan bantuan transportasi	1 Tahun	50.000.000				65.000.000	

2	II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.125.000.000					1.310.000.000
	1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	adanya kendaraan dinas Ooperasional	1 Tahun	460.000.000					470.000.000
	2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	100.000.000					125.000.000
	3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Tahun	30.000.000					35.000.000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	15.000.000					20.000.000
	5	Pengadaan Mesin Genset	tersedianya mesin genset dan kelengkapannya	1 Tahun	250.000.000					270.000.000
	6	Operasional Mesin Genset	Tersedianya Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	1 Tahun	15.000.000					20.000.000
	7	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terselenggaranya pengadaan komputer dan perlengkapannyapemeliharaan	1 Tahun	75.000.000					100.000.000
	8	Pemeliharaan Rutin komputer dan perlengkapannya	Terpeliharanya komputerr dan perlengkapannya	1 Tahun	15.000.000					25.000.000
	9	Pemeliharaan rutin peralatan multi media	Pemeliharaan rutin peralatan multi media	1 Tahun	15.000.000					25.000.000
	10	Pemeliharaan rutin / berkala jaringan internet	terselenggaranya pemeliharaan jaringan	1 Tahun	150.000.000					220.000.000
3	III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			150.000.000					225.000.000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	50.000.000					75.000.000
	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian khusus hari hari tertentu	1 Paket	50.000.000					75.000.000
	3	Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian olahraga beserta perlengkapannya	1 Paket	50.000.000					75.000.000
4	IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			200.000.000					260.000.000
	1	Fasilitasi pendidikan dan pelatihan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat	Tersedianya Biaya Fasilitasi pendidikan dan pelatihan Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat	1 Kegiatan	200.000.000					260.000.000

5	V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			32.500.000					65.000.000
	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Biaya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	5.000.000					10.000.000
	2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA) SKPD	Tersedianya Biaya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA) SKPD	100%	5.000.000					15.000.000
	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Tersedianya Biaya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) SKPD	100%	12.500.000					20.000.000
	4	Penyusunan RENJA	Tersedianya Biaya Penyusunan RENJA	100%	5.000.000					10.000.000
	5	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya Biaya Penyusunan RENSTRA	100%	5.000.000					10.000.000
6	VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA			2.475.140.000					3.376.140.000
	1	Peningkatan Pembangunan Sarana prasarana perangkat intranet dan internet antara SKPD.	Adanya penambahan, peningkatan perangkat jaringan LAN / internet antara SKPD.		320.000.000					710.000.000
	2	Peningkatan akses internet dari provider ke Pemkab Nias Barat	tersedia abodemen untuk internet pemkab Nias Barat		1.186.140.000					1.186.140.000
	3	Pembuatan website Dinas Kominfo dan website SKPD-SKPD sebagai sub domain niasbaratkab.go.id	tersedianya website SKPD-SKPD sebagai sub domain niasbaratkab.go.id		260.000.000					360.000.000
	4	Re-disain website niasbaratkab.go.id sebagai sebagai domain Pemerintah Kabupaten Nias Barat	ter upgrade kembali website niasbaratkab.go.id untuk bisa menjadi portal web bagi website SKPD.		200.000.000					325.000.000
	5	Operasionalisasi website niasbaratkab.go.id dan operator web site setiap skpd-skpd	operasionalisasi informasi pada konten website niasbaratkab.go.id dan operator website SKPD-SKPD		95.000.000					160.000.000
	6	Pengawasan pengendalian menara telekomunikasi	tersedia biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi		50.000.000					65.000.000
	7	Pembentukan,Sosialisasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nias Barat	Terbentuknya PPID Kabupaten Nias Barat		72.000.000					85.000.000
	8	Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	adanya biaya pengelola PPID Daerah dan PPID Pembantu di setiap SKPD		42.000.000					65.000.000
	9	Pembuatan, Penerapan Aplikasi e-Office untuk mendukung e-Government	adanya berbagai Aplikasi e-Office dan jenis aplikasi lainya dari kementrian Kominfo untuk integrasikan pada layanan e-Goverment di Kabupaten Nias Barat		115.000.000					225.000.000
	10	Operasional Pengelolaan Warung Informasi Masyarakat (WIM)	adanya biaya pengelolaan dan pemeliharaan Warung Informasi Masyarakat (WIM)		30.000.000					45.000.000
	11	Pengintegrasian Aplikasi Monitoring Jaringan dari Kemkominfo ke Server Pemkab Nias Barat	terpasangnya aplikasi khusus pada pengelolaan Jaringan dari kementrian kominfo pada server induk pemkab Nias Barat		105.000.000					150.000.000

VII	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Adanya peningkatan dan pengembangan program Bidang Komunikasi dan Informatika		946.261.000					1.413.200.000
1	Penyusunan Master Plan (Rencana induk) Pengembangan e-Government Kabupaten Nias Barat	tersedianya arahan bagi upaya pengembangan komponen-komponen e-Government yang terencana, terpadu, efektif dan efisien Terdapat acuan bagi pengembangan aplikasi perangkat lunak maupun infrastruktur perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien Tersedia panduan bagi upaya pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur untuk mengelola dan menggunakan e-Government	1 Kegiatan	499.500.000					788.700.000
2	Konsultasi, studi banding Program Komunikasi dan Informatika dalam Penerapan e-Government	terlaksana konsultasi dan studi banding Dinas Kominfo Nias Barat ke Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan layanan e-Government	1 Tahun	245.000.000					376.000.000
3	Penyusunan Revisi Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Pengendalian menara telekomunikasi	terlaksana penyusunan Revisi Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Pengendalian menara telekomunikasi	1 Tahun	100.000.000					120.000.000
4	Pelatihan Aparatur Dinas Kominfo sebagai Administrator Aplikasi layanan pemerintahan (dengan aplikasi : <i>si-maya</i> , <i>si-mantra</i> , <i>PNS Mail</i> , <i>PNS BOX</i>) pada Direktorat e-Government kementerian Kominfo.	adanya aparatur Dinas Kominfo yang mengikuti Pelatihan singkat untuk menggunakan aplikasi layanan pemerintahan yang di kembangkan oleh Direktorat e-Gov, sebagai Admin dan Super Admin di Daerah.	1 Tahun	61.761.000					74.500.000
5	Diskusi Pendalaman Tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Diskusi Pendalaman Tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	1 Kegiatan	40.000.000					54.000.000

8	VIII	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA			162.950.000					252.600.000
	1	Penyebarluasan informasi melalui media luar (Baliho dan Spanduk)	tersedianya baliho, spanduk, back drop, standing banner dan rollbanner.	1 kegiatan	32.600.000					45.600.000
	2	Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (Radio)	Pidato, Talkshow dan liputan kegiatan Bupati melalui RRI Gunungsitoli dan TVRI Medan.		24.900.000					34.500.000
	3	Penyebarluasan informasi melalui media cetak	kerjasama dengan media cetak		25.450.000					35.700.000
	4	Dialog Pembangunan Nias Barat di dalam siaran RRI Gunungsitoli	terlaksanan dialog Pembangunan Nias Barat melalui Radio		15.000.000					25.800.000
	5	Mengikuti Pekan Informasi Masyarakat Sumatera Utara / Pekan Informasi Nasional	Terjadi pertukaran informasi dan pengenalan informasi melalui Pekan Informasi Daerah dan Nasional		65.000.000					76.000.000
	6	Pembinaan Media Masa	Terlaksanan pembinaan Media Masa sebagai Mitra Pemerintah		25.000.000					35.000.000
9	IX	PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SDM BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI			225.700.000					303.800.000
	1	Pembentukan, Sosialisasi, Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	adanya kelompok informasi masyarakat (KIM) di setiap Kecamatan di Kabupaten Nias Barat	1 Tahun	42.000.000					55.000.000
	2	Bimtek Literasi TIK : Budaya Dokumentasi dan sertifikasi bagi Aparatur Nias Barat	Terselenggara BIMTEK Pengelolaan Dokumentasi Bagi Pegawai Dinas Kominfo dan SKPD yang menangani pendokumentasian (kerjasama dengan BBPPKI Kominfo Medan)	1 Tahun	50.000.000					72.000.000
	3	Bimtek Literasi TIK bagi Kalangan Wanita	terselenggaranya BIMTEK Pengenalan TIK bagi kalangan wanita (program kerjasama dengan BBPPKI Kominfo Medan)	1 Tahun	45.000.000					65.800.000
	4	Bimtek Administrator dan Teknisi Jaringan Lan/internet	tersedia SDM yang mengelola Jaringan Pemkab Nias Barat (fasilitasi Pelatihan oleh BBPPKI Kominfo Medan)	1 Tahun	38.000.000					46.000.000
	5	Bimtek dan Sertifikasi Governern Chief Information Officer (GCIO) dan Project Manajemen IT	adanya Aparatur yang bersertifikat GCIO dan Project Managemen IT	1 Tahun	50.700.000					65.000.000

10	X	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSANDIAN			211.000.000					346.000.000
		Sosialisasi kesadaran informasi di lingkungan Pemerintah Daerah	terlaksana sosialisasi kesadaran informasi dengan menggunakan metode persandian kepada pejabat Daerah	1 tahun	76.000.000					80.000.000
		Pelatihan Aparatur Sandiman ke Lembaga Sandi Negara	adanya Aparatur yang mengikuti Pelatihan di Lemsaneg.	1 tahun	50.000.000					70.000.000
11	XI	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK, DATA/INFORMASI			42.500.000					98.000.000
		Penyusunan Buku Nias Barat Dalam Angka	tersedianya buku hasil analisa publik dan buku hasil analisa feedback terhadap kegiatan-kegiatan Pemkab Nias Barat.	1 tahun	42.500.000					55.000.000
		Pengumpulan/updating dan processing data Informasi internal dan eksternal	Tersedianya Pengumpulan/updating dan processing data Informasi internal dan eksternal sebagai bahan pengambilan Keputusan	1 tahun	28.600.000					43.000.000
		JUMLAH BTL			778.653.170	0				778.645.868
		JUMLAH BL			6.569.521.000	0				9.035.520.000
		TOTAL BTL+BL			7.348.174.170	0				9.814.165.868

LAHOMI OKTOBER 2016

**TIM PERUMUS RENJA, PPAS, RKA, DAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI DAN**

- | | | |
|------------------------------------|---|-------|
| 1. Drs. Yosafati Hia.,MM | 1 | _____ |
| Koordinator | | |
| 2. Drs. Turuna Gulo.,MM | 2 | _____ |
| Anggota | | |
| 3. Arlis Arif Domo, SE | 3 | _____ |
| Anggota | | |
| 4. Solifati Gulo, S.Kom.,MM | 4 | _____ |
| Anggota | | |

Tim Perumus
RPHMD,RENSTRA,PPAS, RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS
BARAT
TAHUN 2016

1. **Drs. YOSAFATI HIA, MM** : (Koordinator)
(Assisten II)
2. **Drs. TURUNA GULO, MM** : (Anggota)
(Staf Ahli Bupati)
3. **ARLIS ARIF DOMO, SE** : (Anggota)
(Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika)
4. **SOLIFATI GULO, S.Kom,MM** : (Anggota)
(Kasi Pengelolaan Data Elektronik dan Informasi)

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2017**

Urusan : Komunikasi dan Informatika
SKPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik / Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintah daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Kerja Pendanaan									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rp 890.000.000								
	Gaji Pegawai	Tersedianya gaji Pegawai (PNS dan CPNS)	Diskominfo	Rp 890.000.000								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum dan Kantor serta Pengadaan Barang dan Jasa		Rp 1.148.750.000		Rp 1.397.970.000		Rp 1.555.470.000		1.285.470.000		1.405.000.000
1.1	Kegiatan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	Rp 1.500.000	1 Tahun	Rp 7.500.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 12.500.000	1 Tahun	Rp 15.000.000
1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya, air dan listrik	Tersedianya Jasa Pelayanan Telepon,	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 27.500.000	1 Tahun	Rp 30.000.000
1.3	Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	Rp 97.250.000	1 Tahun	Rp 235.470.000	1 Tahun	Rp 245.470.000	1 Tahun	Rp 255.470.000	1 Tahun	Rp 305.000.000
1.4	kegiatan penyediaan jasa administrasi u	Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi umum barang dan Honorer	1 Tahun	Rp 598.000.000	1 Tahun	Rp 550.000.000	1 Tahun	Rp 575.000.000	1 Tahun	Rp 600.000.000	1 Tahun	Rp 625.000.000
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	1 Tahun	Rp 22.000.000	1 Tahun	Rp 30.000.000	1 Tahun	Rp 35.000.000	1 Tahun	Rp 40.000.000	1 Tahun	Rp 45.000.000
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Map Dinas Kominfo Nias Barat	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 30.000.000	1 Tahun	Rp 35.000.000	1 Tahun	Rp 40.000.000
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Tahun	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 30.000.000	1 Tahun	Rp 35.000.000
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	Rp 70.000.000	1 Tahun	Rp 80.000.000	1 Tahun	Rp 90.000.000	1 Tahun	Rp 100.000.000	1 Tahun	Rp 110.000.000
1.9	kegiatan rapat- rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	Tersedianya kegiatan rapat- rapat koordinasi	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 350.000.000	1 Tahun	Rp 450.000.000	1 Tahun	Rp 100.000.000	1 Tahun	Rp 110.000.000
1.10	monitoring / survei evaluasi serta rapat koordinasi dalam daerah.	Tersedianya monitoring / survei evaluasi serta rapat koordinasi dalam daerah.	1 Tahun	Rp 70.000.000	1 Tahun	Rp 75.000.000	1 Tahun	Rp 80.000.000	1 Tahun	Rp 85.000.000	1 Tahun	Rp 90.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur		Rp 1.175.000.000		Rp 2.010.000.000		Rp 2.360.000.000		Rp 2.960.000.000		Rp 3.420.000.000
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasio	Tersedianya kendaraan operasional khusus Operasional	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 460.000.000	1 Tahun	Rp 520.000.000	1 Tahun	Rp 580.000.000	1 Tahun	Rp 640.000.000
2.2	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	1 Tahun	Rp 75.000.000	1 Tahun	Rp 125.000.000	1 Tahun	125.000.000	1 Tahun	Rp 150.000.000	1 Tahun	Rp 175.000.000
2.3	kegiatan pemeliharaan rutin / berkala ged	Tersedianya pemeliharaan rutin / gedung kantor	1 Tahun	Rp 50.000.000	1 Tahun	Rp 35.000.000	1 Tahun	Rp 40.000.000	1 Tahun	Rp 45.000.000	1 Tahun	Rp 50.000.000
2.4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala dan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Tahun	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 30.000.000	1 Tahun	Rp 35.000.000
2.5	Pengadaan mesin genset dan perlengkapannya	Tersedianya mesin genset dan perlengkapannya	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Tahun	Rp 270.000.000	1 Tahun	Rp 290.000.000	1 Tahun	Rp 310.000.000	1 Tahun	Rp 330.000.000
2.6	kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mesin genset dan perlengkapannya	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mesin genset dan perlengkapannya	1 Tahun	Rp 75.000.000	1 Tahun	Rp 100.000.000	1 Tahun	Rp 125.000.000	1 Tahun	Rp 150.000.000	1 Tahun	Rp 200.000.000
2.7	pengadaan komputer dan perlengkapan	Tersedianyan komputer dan perlengkapannya	1 Tahun	Rp 100.000.000	1 Tahun	Rp 125.000.000	1 Tahun	Rp 150.000.000	1 Tahun	Rp 175.000.000	1 Tahun	Rp 200.000.000
2.8	Pemeliharaan Rutin komputer dan perlengkap	terpeliharanya komputer dan perlengkapannya	1 Tahun	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 30.000.000	1 Tahun	Rp 35.000.000	1 Tahun	40.000.000
2.9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Multi Media	terpeliharanya perawatan peralatan rutin /berkala peralatan multi media	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	Rp 30.000.000	1 Tahun	Rp 35.000.000	1 Tahun	Rp 40.000.000
2.10	Pengadaan perlengkapan ruangan server dan data server	tersedianya perlengkapan ruangan server dan data server	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 400.000.000	1 Tahun	Rp 550.000.000	1 Tahun	Rp 700.000.000	1 Tahun	Rp 850.000.000

2.11	Pemeliharaan perlengkapan ruangan server dan data server	Terpeliharanya perlengkapan ruangan server dan data server	1 Tahun	Rp 25.000.000	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	
2.12	Pengadaan Mebeluer	Tersedianya Mebeluer	1 Tahun	Rp 100.000.000	1 Tahun	Rp 150.000.000	1 Tahun	Rp 200.000.000	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 300.000.000
2.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan	Terselenggaranya pemeliharaan Jaringan	1 Tahun	Rp 200.000.000	1 Tahun	Rp 300.000.000	1 Tahun	Rp 400.000.000	1 Tahun	Rp 500.000.000	1 Tahun	Rp 600.000.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Disiplin Pegawai Dinas Kominfo Nias Barat dengan Pakaian Dinas PDH		Rp 150.000.000		Rp 180.000.000		Rp 210.000.000		Rp 240.000.000		Rp 270.000.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PDH	1 Tahun	Rp 50.000.000	1 Tahun	Rp 60.000.000	1 Tahun	Rp 70.000.000	1 Tahun	Rp 80.000.000	1 Tahun	Rp 90.000.000
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	Rp 50.000.000	1 Tahun	Rp 60.000.000	1 Tahun	Rp 70.000.000	1 Tahun	Rp 80.000.000	1 Tahun	Rp 90.000.000
3.3	Pengadaan Pakaian Olahraga dan Berserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga dan Beserta Perlengkapannya	1 Tahun	Rp 50.000.000	1 Tahun	Rp 60.000.000	1 Tahun	Rp 70.000.000	1 Tahun	Rp 80.000.000	1 Tahun	Rp 90.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan SDM Aparatur dalam bidang Komunikasi dan Informatika		Rp 200.000.000		Rp 300.000.000		Rp 400.000.000		Rp 500.000.000		Rp 600.000.000
4.1	Peningkatan SDM aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek.	Terselenggaranya Peningkatan SDM dan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek.	1 Tahun	Rp 200.000.000	1 Tahun	Rp 300.000.000	1 Tahun	Rp 400.000.000	1 Tahun	Rp 500.000.000	1 Tahun	Rp 600.000.000
5	Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kominfo Nias Barat		Rp 50.000.000		Rp 95.000.000		Rp 140.000.000		Rp 185.000.000		Rp 230.000.000
5.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Perbulan	Tersedianya Laporan Kegiatan perbulan	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
5.2	Kegiatan Penyusunan Keuagan Akhir Tahun	Tersedianya RENJA dan RKA	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
5.3	Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya Renja SKPD	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Tahun	Rp 20.000.000	1 Thn	Rp 25.000.000	1 Tahun	Rp 30.000.000
5.4	Kegiatan Penyusunan Lakip	Penyusunan Lakip	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
5.5	Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya Renja SKPD	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
5.6	Kegiatan Penyusunan RKA SKPD	Tersedianya RKA SKPD	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
5.7	Kegiatan Penyusunan P. APBD SKPD	Tersedianya P. APBD SKPD	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
5.8	Kegiatan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya DPA SKPD	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
5.9	Kegiatan Penyusunan DPA P.APDB SKPD	Tersedianya DPA P.APDB SKPD	1 Tahun	Rp 5.000.000	1 Tahun	Rp 10.000.000	1 Tahun	Rp 15.000.000	1 Thn	Rp 20.000.000	1 Tahun	Rp 25.000.000
6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatkan dan Mengembangkan Informasi Melalui Media Informasi Secara Elektronik yang Dapat Diakses Masyarakat Luas melalui internet		Rp 31.722.688.320		Rp 32.016.100.000		Rp 38.455.200.000		Rp 38.539.950.000		Rp 41.351.790.000
6.1	Pengembangan Infrastruktur Jaringan komunikasi dan informasi pada sekolah, puskesmas dan kantor kecamatan	dapat terkoneksi melalui Jaringan LAN, Wan dan Internet Sekolah, Puskesmas dan Kantor pemerintah di kecamatan dan di beberap SKPD yang belum tersambung komunikasi data	5%	Rp 1.872.000.000	10%	Rp 1.900.000.000	20%	Rp 1.945.000.000	30%	Rp 1.975.000.000	40%	Rp 2.000.000.000
6.2	Pembangunan, Peningkatan dan operasionalisasi server	Tersedianya server Pemkab Nias Barat yang up to date	5%	Rp 288.000.000	10%	Rp 460.000.000	20%	Rp 780.000.000	40%	Rp 900.000.000	55%	Rp 950.000.000
6.3	Peningkatan perlengkapan ruangan Server	Tersedia kelengkapan yang dibutuhkan optimalisasi fungsi server	5%	Rp 356.000.000	15%	Rp 460.000.000	25%	Rp 520.000.000	35%	Rp 600.000.000	50%	Rp 650.000.000
6.4	Monitoring dan evaluasi server, peralatan jaringan	Tersedia biaya operasional pengawasan, pemeliharaan server dan jaringan	10%	Rp 366.000.000	15%	Rp 564.000.000		Rp 688.000.000		Rp 786.600.000		Rp 876.000.000
6.5	Pengembangan Infrastruktur disaster recovery dan TIK	Tersedianya server data center beserta kelengkapannya, dan server backup data untuk antisipasi bencana alam.	10%	Rp 760.000.000	15%	Rp 1.250.000.000	25%	Rp 900.000.000	35%	Rp 850.000.000	45%	Rp 300.000.000
6.6	Operasional Maintenance Data center dan disaster recovery TIK	tersedia biaya pengawasan, sewa tempat dan pemeliharaan data center dan disaster recovery	6%	Rp 230.000.000	10%	Rp 350.000.000	20%	Rp 435.000.000	30%	Rp 500.000.000	45%	Rp 576.000.000
6.7	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di daerah blank spot dan kabel optik	tersedia akses jaringan internet melalui kabel optik dan wifi di untuk meningkatkan kualitas akses informasi	5%	Rp 830.000.000	10%	Rp 950.000.000	20%	Rp 1.250.000.000	25%	Rp 1.530.000.000	35%	Rp 1.650.000.000

6.8	Peningkatan kualitas layanan informasi komunikasi pada kawasan khusus daerah tujuan wisata Nias barat	tersedia infrastruktur menara telekomunikasi (Base transeiver Station) dan atau kabel Optik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi pada kawasan pariwisata Nias barat	6%	Rp 1.678.000.000	12%	Rp 1.950.000.000	15%	Rp 2.245.000.000	20%	Rp 2.556.750.000	25%	Rp 2.789.000.000
6.9	Operasional infrastruktur Hotspot dan kabel Optik	tersedia biaya pemeliharaan infrastruktur hotspot dan fiber optik di Nias Barat	5%	Rp 365.000.000	12%	Rp 456.000.000	20%	Rp 550.000.000	30%	Rp 660.000.000	55%	Rp 789.000.000
6.10	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemkab Nias Barat	Tersedianya Infrastruktur Video Convergence / tele convergence, sistem dan kelengkapannya,	5%	Rp 650.000.000	8%	Rp 790.000.000	20%	Rp 9.000.000	25%	Rp 960.000.000	35%	Rp 1.120.000.000
6.11	Pengadaan alat komunikasi aiphone/pabx interkom	Tersedianya saluran komunikasi telepon antar SK	3%	Rp 635.000.000	8%	Rp 650.000.000	15%	Rp 655.000.000	20%	Rp 675.000.000	25%	Rp 660.000.000
6.12	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan perangkat Video Convergence	Tersedia biaya pemeliharaan alat komunikasi per	5%	Rp 190.000.000	10%	Rp 240.000.000	20%	Rp 260.000.000	30%	Rp 290.000.000	35%	Rp 320.000.000

6.13	Peningkatan Pembangunan Sarana prasarana Perangkat intranet dan internet antar SKPD	Tersedia Jaringan LAN (Intranet) dan perangkatinternet di seluruh SKPD Nias Barat	5%	Rp	670.000.000	10%	Rp	710.000.000	15%	Rp	755.000.000	25%	Rp	786.000.000	30%	Rp	825.000.000
6.14	Pembangunan dan Peningkatan sarana CCTV luar dalam di area perkantoran Terpadu dan dilokasi umum lainnya.	meningkatkan sistem keamanan dengan pemasangan cctv di halaman kantor, jalan raya, area perkantoran terpadu dan bagian dalam perkantoran.	5%	Rp	678.000.000	10%	Rp	724.000.000	20%	Rp	765.000.000	25%	Rp	788.000.000	35%	Rp	790.000.000
6.15	Pembangunan Website SKPD-SKPD sebagai Sub Domain Website Pemkab Nias Barat re-disain Portal web Kabupaten Nias Barat	Tersedianya website SKPD SKPD sebagai sub domain website Pemkab Nias Barat beserta Portal web Kabupaten Nias Barat	3%	Rp	360.000.000	5%	Rp	570.000.000	10%	Rp	650.000.000	15%	Rp	200.000.000	20%	Rp	200.000.000
6.16	Operasionalisasi Upgrade/Re-Design Domain Website Nias Barat Kab Go.id	Upgrade Portal web dan website Pemkab Nias Barat	5%	Rp	230.000.000	15%	Rp	325.000.000	25%	Rp	300.000.000	35%	Rp	345.000.000	50%	Rp	300.000.000
6.17	Operator Sub Domain website SKPD SKPD Pemkab Nias Barat	Tersedianya admin website pada SKPD SKPD Pemkab Nias Barat	3%	Rp	160.000.000		Rp	180.000.000		Rp	240.000.000		Rp	285.000.000		Rp	325.000.000
6.18	Operasional Website dan Intranet Pemerintah Nias Barat	Operasionalisasi dan Updating Data/Informasi Pada Konten Website Pemkab Nias Barat Setiap Hari	5%	Rp	105.000.000	20%	Rp	125.000.000	30%	Rp	160.000.000	40%	Rp	189.000.000	50%	Rp	200.000.000
6.19	Pembangunan Website Pemkab Nias Barat Versi Android	Tersedianya Website Pemkab Nias Barat Versi Android.	5%	Rp	200.000.000		Rp	82.600.000		Rp	350.000.000		Rp	75.000.000		Rp	85.000.000
6.20	Operasional Website berbasis android	Tersedianya operasional pengelolaan websiteNias Barat Berbasis Android	5%	Rp	75.000.000		Rp	90.000.000		Rp	86.000.000		Rp	90.000.000		Rp	96.000.000
6.21	Pengembangan Aplikasi Generik, spesifik dan suplemen seluruh SKPD untuk peningkatan layanan eGovernment	Tersedianya software aplikasi, database di setiap skpd untuk meningkatkan layanan	5%	Rp	650.000.000		Rp	590.000.000		Rp	880.000.000		Rp	960.000.000		Rp	990.000.000
6.22	Pengembangan Aplikasi Destinasi wisata Nias Barat (Nias Barat Destination)Versi Android	Tersedianya aplikasi lokasi wisata,kuliner hotel dan tempat2 lain di Nias barat berbasis android	10%	Rp	5.550.000.000	15%	Rp	210.000.000	25%	Rp	400.000.000	35%	Rp	435.000.000	60%	Rp	500.000.000
6.23	Operasional Pengelolaan Aplikasi Nias Barat Destination	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perawatan aplikasi Nias Barat Destination	10%	Rp	135.000.000	15%	Rp	90.000.000	25%	Rp	290.000.000	40%	Rp	350.000.000	60%	Rp	425.000.000
6.24	Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya Biaya Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah dan PPID Pembantu di setiap SKPD	5%	Rp	85.000.000	10%	Rp	860.000.000	25%	Rp	96.000.000	35%	Rp	105.000.000		Rp	145.000.000
6.25	Pengembangan aplilkasi berbasis web Tata Kelola pemerintah berbasis elektronik	Tersedia aplikasi berbasis web di beberapa skpd untuk meningkatkan layanan aplikasi keperintahandan berbagai aplikasi lainnya	5%	Rp	750.000.000	10%	Rp	550.000.000	15%	Rp	950.000.000	20%	Rp	1.150.000.000	25%	Rp	1.350.000.000
6.26	Operasional pengelolaan aplikasi pemerintahan berbasis web	Tersedianya Biaya Pengelolaan dan Perawatan Aplikasi Tata kelolah pemerintah berbasis Elektronik	5%	Rp	250.000.000	10%	Rp	290.000.000	10%	Rp	295.400.000	15%	Rp	310.000.000	20%	Rp	325.000.000
6.27	Operasional Informasi melalui media Online	Tersedianya Media Online bagi pemerintah dan masyarakat	5%	Rp	396.000.000	10%	Rp	460.000.000	5%	Rp	400.000.000	15%	Rp	420.000.000	20%	Rp	435.000.000
6.28	Pemakaian Internet acces dan local link dari provider ke Pemkab Nias Barat	Tersedianya Biaya Abodemen untuk internet dan komunikasi	5%	Rp	2.532.388.320	10%	Rp	3.150.000.000	15%	Rp	3.850.000.000	20%	Rp	4.120.000.000	25%	Rp	4.675.640.000
6.29	Pembangunan dan Operasionalisasi security Data Center	Keamanan Data oleh Tenaga Ahli	5%	Rp	260.000.000	10%	Rp	350.000.000	15%	Rp	355.000.000	20%	Rp	375.000.000	25%	Rp	389.000.000
6.30	Pembangunan dan Operasionalisasi Media SMS Center	Terselenggaranya Monitoring akses Internet di SKPD-SKPD Pemkab Nias Barat	5%	Rp	190.000.000	10%	Rp	200.000.000	20%	Rp	220.000.000	25%	Rp	245.000.000	30%	Rp	268.700.000
6.31	Pembangunan dan Operasionalisasi layar monitor billboard	Tersedinya layar monitor billboard Kab. Nias Barat	5%	Rp	300.000.000	10%	Rp	550.000.000	20%	Rp	430.000.000	25%	Rp	460.000.000	30%	Rp	489.500.000

6.32	Pembangunan dan Operasionalisasi ICT (Information and communication Technogy)	Operasionalisasi Sistem Informasi dan Jaringan IT Pemkab Nias Barat di Dukung tenaga Ahli ICT	5%	Rp 368.000.000	10%	Rp 455.000.000	15%	Rp 465.000.000	20%	Rp 478.000.000	25%	Rp 495.700.000
6.33	Pengumpulan/updating dan processing data Informasi internal dan ekstenal	Tersedianya Updating data Informasi Internal dan Eksternal Nias Barat untuk bahan pengambilan Keputusan dan kebijakan bagi Kepala Daerah	5%	Rp 176.000.000	10%	Rp 190.000.000	15%	Rp 675.000.000	20%	Rp 720.000.000	25%	Rp 850.000.000
6.34	Analisa Issu publik terhadap kegiatan Pemkab Nias Barat	Tersedianya buku hasil analisis isu publik dan buku hasil analisis feedback terhadap kegiatan-kegiatan Pemkab Nias Barat yang berasal dari media cetak	5%	Rp 130.000.000	10%	Rp 200.000.000	15%	Rp 212.000.000	20%	Rp 234.500.000	25%	Rp 286.750.000
6.35	Pengadaan Alat Komunikasi Repeater HT beserta kelengkapannya	Tersedianya alat komunikasi HT untuk komunikasi Dinas Kominfo	5%	Rp 250.000.000	10%	Rp 300.000.000	15%	Rp 310.000.000	20%	Rp 345.000.000	25%	Rp 376.900.000
6.36	Pengawasan, Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tersedianya biaya pengawasan pengendalian menara telekomunikasi	5%	Rp 80.000.000	10%	Rp 90.000.000	15%	Rp 320.000.000	20%	Rp 375.000.000	25%	Rp 400.000.000
6.37	Pengawasan pemasangan kabel optik diwilayah Nias Barat	Tersedianya biaya pengawasan kabel optik diwilayah Nias Barat	5%	Rp 75.000.000	10%		15%	Rp 90.000.000	25%	Rp 95.000.000	30%	Rp 100.000.000
6.38	Pembangunan sarana prasarana media center beserta kelengkapannya	Tersedianya media center di ibu kota kabupaten Nias Barat	5%	Rp 850.000.000	10%	Rp 900.000.000	15%	Rp 1.150.000.000	25%	Rp 1.367.800.000	30%	Rp 1.689.850.000
6.39	Pengadaan perlengkapan media Center	Tersedia perlengkapan media center :komputer, LAN, Jaringan Internet, beserta kelengkapannya	5%	Rp 256.000.000	10%	Rp 350.000.000	25%	Rp 560.000.000	35%	Rp 650.000.000		Rp 600.000.000
6.40	Operasional pengelola media Center	Tersedia biaya operasional dan perawatan media center	5%	Rp 125.000.000	10%	Rp 185.000.000	15%	Rp 187.000.000	20%	Rp 195.000.000	25%	Rp 210.000.000
6.41	Peningkatan Pengelolaan Server dan Aplikasi LPSE	Tersedianya biaya ugrade, pemeliharaan hardware dan software server layanan pengadaan (LPSE) Nias Barat	10%	Rp 450.000.000	20%	Rp 500.000.000	25%	Rp 589.000.000	30%	Rp 624.300.000	35%	Rp 765.000.000
6.42	Operasional pemeliharaan layanan LPSE	Tersedia biaya operasional LPSE Nias Barat	10%	Rp 175.000.000	25%	Rp 245.000.000	25%	Rp 490.000.000	35%	Rp 495.000.000	35%	Rp 597.000.000
6.43	Operasional pengintegrasian berbagai Aplikasi antar SKPD Nias Barat	Tersedianya Biaya operasional dan pemeliharaan pengintegrasian aplikasi, database aplikasi disetiap SKPD	5%	Rp 165.000.000	12%	Rp 187.000.000	15%	Rp 210.000.000	20%	Rp 250.000.000	30%	Rp 286.000.000
6.44	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah (DETIKDA)	Pembentukan Dewan Teknolgi Informasi Komukasi Daerah (DETIKDA) Kab. Nias Barat mendukung pembangunan ICT	5%	Rp 320.000.000	10%	Rp 400.000.000	15%	Rp 420.000.000	20%	Rp 467.000.000	25%	Rp 500.000.000
6.45	Pembangunan WIM(warnet) di bebarapa kecamatan	Adanya warnet yang di kelolah pemerintah untuk layanan internet disetiap kecamatan	5%	Rp 875.000.000	10%	Rp 950.000.000	20%	Rp 400.000.000	25%	Rp 575.000.000	30%	Rp 500.000.000
6.46	Pengadaan Genset beserta kelengkapannya pada gedung warung informasi masyarakat (WIM)	Tersedia listrik sebagai pendukung kegiatan operasional WIM	5%	Rp 75.000.000	10%	Rp 150.000.000	15%	Rp 185.800.000	20%	Rp 210.000.000	25%	Rp 260.000.000

6.47	Operasional pemeliharaan dan pengawasan Warung Informasi Masyarakat (WIM)	Tersedianya Biaya pemeliharaan, Biaya Operasional, honor petugas, pengelola, penjaga WIM	5%	Rp 76.000.000	10%	Rp 85.000.000	15%	Rp 90.000.000	20%	Rp 96.000.000	25%	Rp 105.000.000
6.48	Pembangunan infrastruktur radio komunikasi keselamatan bagi Nelayan	Adanya infrastruktur radio komunikasi keselamatan bagi Nelayan di wilayah Nias Barat	5%	Rp 1.850.000.000	10%	Rp 1.900.000.000	20%	Rp 1.245.000.000	25%	Rp 1.295.000.000	30%	Rp 1.350.000.000
6.49	Digitalisasi data	Terlaksananya Digitalisasi data	5%	Rp 85.000.000	10%	Rp 95.000.000	15%	Rp 110.000.000	20%	Rp 164.000.000	25%	Rp 192.000.000
6.50	Dokumentasi Pelaporan dan Perpustakaan Kegiatan Dinas Kominfo	Terdokumentasinya kegiatan Dinas Kominfo	5%	Rp 90.000.000	10%	Rp 110.000.000	15%	Rp 132.000.000	20%	Rp 154.000.000	25%	Rp 184.000.000
6.51	Pembekalan Tata Kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung Good Government	Adanya pembekalan Tata kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung Good Government di Nias Barat	5%	Rp 96.300.000	10%	Rp 115.000.000	20%	Rp 250.000.000	30%	Rp 350.000.000	40%	Rp 390.000.000
6.52	Lomba Foto Destinasi Wisata & Atraksi Budaya Nias Barat	Terlaksananya Lomba foto Destinasi wisata & atraksi budaya Nias Barat	5%	Rp 75.000.000	10%	Rp 95.000.000	20%	Rp 105.000.000	25%	Rp 124.000.000	35%	Rp 165.000.000
6.53	Lomba Foto pembangunan & Realitas Sosial di Nias Barat	Terlaksananya lomba foto pembangunan & Realitas sosial di Nias Barat	5%	Rp 75.000.000	10%	Rp 95.000.000		Rp 105.000.000	25%	Rp 124.000.000	35%	Rp 165.000.000
6.54	Pembuatan AudioVisual LKPJ Bupati Nias Barat	Adanya audiovisual LKPJ Bupati Nias Barat	5%	Rp 87.600.000	10%	Rp 100.000.000	15%	Rp 121.000.000	20%	Rp 153.000.000	25%	Rp 146.750.000
6.55	Pembuatan sistem informasi manajemen bantuan sosial	Tersedianya pembuatan sistem bantuan sosial	5%	Rp 240.000.000	10%	Rp 360.000.000	25%	Rp 150.000.000	30%	Rp 150.000.000	45%	Rp 145.000.000
6.56	Pengembangan dan pemutakhiran aplikasi pendukung e-Government	Adanya pengembangan dan pemutakhiran aplikasi pendukung e-Government	5%	Rp 186.700.000	10%	Rp 296.000.000	15%	Rp 320.000.000	20%	Rp 367.000.000	25%	Rp 421.000.000
6.57	Layanan bantuan TIK bagi SKPD di Kabupaten Nias Barat	Adanya Layanan bantuan TIK bagi SKPD di Kabupaten Nias Barat	5%	Rp 112.700.000	10%	Rp 187.000.000	15%	Rp 190.000.000	25%	Rp 210.000.000	30%	Rp 245.000.000
6.58	Pengelolaan data sistem absensi elektronik Pemkab Nias Barat	Terlaksananya Pengelolaan data sistem absensi elektronik Pemkab Nias Barat	5%	Rp 76.000.000	10%	Rp 124.000.000	15%	Rp 156.000.000	20%	Rp 190.000.000	30%	Rp 210.000.000
6.59	Pembuatan Softcopy Nias Barat	Adanya Pembuatan Softcopy Nias Barat	5%	Rp 78.000.000	10%	Rp 96.000.000	30%	Rp 225.000.000	45%	Rp 160.000.000	60%	Rp 150.000.000
6.60	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Tersosialisasinya Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	5%	Rp 67.000.000	10%	Rp 82.500.000	15%	Rp 92.000.000	20%	Rp 120.000.000	30%	Rp 145.000.000
6.61	Rapat koordinasi TIK bersama SKPD Nias Barat	Adanya Rapat koordinasi TIK bersama SKPD Nias Barat	5%	Rp 194.000.000	10%	Rp 205.000.000	15%	Rp 215.000.000	20%	Rp 254.000.000	30%	Rp 288.000.000
6.62	Pembuatan sistem informasi manajemen LAKIP	Adanya pembuatan sistem informasi manajemen lakip	5%	Rp 98.000.000	10%	Rp 166.000.000	15%	Rp 186.000.000	20%	Rp 106.000.000	30%	Rp 210.000.000
6.63	Kegiatan movev dan penilaian PPID oleh komisi informasi kabupaten Nias Barat	Terlaksananya kegiatan movev dan penilaian PPID oleh komisi informasi Kabupaten Nias Barat	5%	Rp 74.000.000	10%	Rp 86.000.000	15%	Rp 90.000.000	20%	Rp 112.000.000	30%	Rp 126.000.000
6.64	Monitoring dan Evaluasi kinerja PDIP di SKPD se-kabupaten Nias Barat	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja PPID di SKPD se-Kabupaten Nias Barat	5%	Rp 150.000.000	10%	Rp 150.000.000	15%	Rp 150.000.000	20%	Rp 150.000.000	30%	Rp 150.000.000
6.65	Pertemuan relawan TIK Nasional di Pemkab Nias Barat 2019/2020	Terlaksananya Pertemuan relawan TIK Nasional di Pemkab Nias Barat	5%		10%		15%		20%		30%	
6.66	Pembuatan Sistem Aplikasi e-Sekolah	Adanya Pembuatan Sistem Aplikasi e-sekolah Pe	5%	Rp 295.000.000	10%	Rp 390.000.000	25%	Rp 485.000.000	30%	Rp 592.000.000	30%	Rp 687.000.000
6.67	Pemeliharaan Sistem Aplikasi e-Sekolah Pendidikan di Pemkab Nias Barat	Adanya Pemeliharaan Sistem Aplikasi e-Sekolah Pendidikan di Pemkab Nias Barat	5%	Rp 210.000.000	10%	Rp 310.000.000	25%	Rp 410.000.000	30%	Rp 510.000.000	30%	Rp 610.000.000
6.68	Pembuatan Program Aplikasi e-Planning dan e-Budget	Adanya Pembuatan Program Aplikasi e-Planning dan e-Budget	5%	Rp 595.000.000	10%	Rp 695.000.000	25%	Rp 790.000.000	30%	Rp 886.000.000	30%	Rp 985.000.000
6.69	Pemeliharaan Program Aplikasi e-Planning dan e-budget	Adanya Pemeliharaan Program Aplikasi e-Planning	5%	Rp 210.000.000	10%	Rp 310.000.000	25%	Rp 410.000.000	30%	Rp 510.000.000	30%	Rp 610.000.000
6.70	Pembuatan Aplikasi e-Help untuk Puskesmas	Adanya Pembuatan Aplikasi e-Help untuk Puskesmas	5%	Rp 325.000.000	10%	Rp 425.000.000	25%	Rp 350.000.000	30%	Rp 200.000.000	30%	Rp 200.000.000
6.71	Pemeliharaan Aplikasi e-Help	Adanya Pemeliharaan Aplikasi e-Help untuk Pusk	5%	Rp 210.000.000	10%	Rp 310.000.000	25%	Rp 4.105.000.000	30%	Rp 510.000.000	30%	Rp 61.000.000

7	Pengkajian dan Penelitian Bidang komunikasi dan Informasi	Meningkatnya dan berkembangnya Program di bidang komunikasi dan Informatika		Rp 5.301.400.000		Rp 5.429.100.000		Rp 5.957.500.000		Rp 7.000.700.000		Rp 8.016.700.000
7.1	Pembuatan, Penyusunan Master Plan Pengembangan TIK dan Infstruktur e-Government	Tersedianya panduan jangka panjang percepatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan e-government Pemkab Nias Barat	15%	Rp 885.000.000	25%	Rp 23.350.000	35%	Rp 90.000.000	45%	Rp 95.000.000	55%	Rp 100.000.000
7.2	Penyusunan Produk Hukum pengembangan TIK dan eGovernment Nias Barat	Adanya Perda dan Perbub Penetapan Masterplan dan Pengembangan TIK, e-Government Nias Barat	10%	Rp 278.000.000	20%	Rp 293.000.000	25%	Rp 108.000.000	35%	Rp 121.000.000	40%	Rp 136.000.000
7.3	Konsultasi Progran bidang komunikasi dan informatika	Terlaksananya Konsultasi program bidang komunikasi dan informatika	5%	Rp 398.000.000	25%	Rp 235.000.000	15%	Rp 86.000.000	45%	Rp 90.000.000	35%	Rp 94.000.000
7.4	Konsultasi dan studi banding pembangunan lembaga penyiaran publik Radio Pemerintah Kab. Nias Barat	Terlaksana studi banding perencanaan, pengelolaan LPP radio dan televisi di beberapa lokasi yang sudah melaksanakan diluar Daerah Kabupaten Nias Barat	10%	Rp 395.000.000	20%	Rp 350.000.000	15%	Rp 300.000.000	20%	Rp 265.000.000	25%	Rp 200.000.000
7.5	Penyusunan produk buku lembaga penyiaran publik LPP radio pemerintah dan swasta di Nias Barat	Adanya legalistas hukum yang mengatur pengelolaan lembaga penyiaran publik (LPP) radio milik pemerintah dan swasta yang beroperasi diwilayah Kabupaten Nias Barat	5%	Rp 300.000.000	10%	Rp 395.000.000	15%	Rp 250.000.000	20%	Rp 200.000.000	25%	Rp 1.350.000.000
7.6	Lembaga Infrastruktur lembaga penyiaran publik (LPP) radio Pemerintah Kabupaten Nias Barat	Adanya radio pemerintahan Nias Barat sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat	5%	Rp 985.000.000	10%	Rp 1.242.000.000	15%	Rp 1.340.000.000	20%	Rp 1.798.000.000	25%	Rp 1.019.000.000
7.7	Operasional pengelolaan radio penyiaran publik milik Pemkab Nias Barat	Tersedianya biaya operasional radio Pemkab Nias Barat	5%	Rp 135.000.000	10%	Rp 356.000.000	15%	Rp 557.000.000	20%	Rp 674.000.000	25%	Rp 765.000.000
7.8	Penyusunan Revisi Perda No.3 tahun 2011 tentang pengawasan , pengendalian menara telekomunikasi	Terlaksananya Penyusunan Revisi Perda No.3 tahun 2011 tentang pengawasan , pengendalian menara telekomunikasi	15%	Rp 160.000.000	10%	Rp 180.000.000	15%	Rp 200.000.000	20%	Rp 210.000.000	25%	Rp 230.000.000
7.9	Seminar peran srategi kominfo dalam membangun kawasan ekonomi khusus kepariwisataan di wilayah kepulauan Nias	Terlaksananya strategi kominfo dalam membangun kawasan ekonomi khusus kepariwisataan diwilayah Kepulauan Nias	10%	Rp 360.000.000	20%	Rp 450.000.000	15%	Rp 400.000.000	20%	Rp 460.000.000	25%	Rp 550.000.000
7.10	Penyusunan Regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government	Adanya kebijakan terpadu pengelolaan pemanfaatan e-Government	5%	Rp 125.000.000	10%	Rp 290.000.000	15%	Rp 323.000.000	20%	Rp 410.000.000	25%	Rp 456.700.000
7.11	Bimtek pemanfaatan jaringan serat optik	Terlaksananya bimtek pemanfaatan jaringan serat optik	5%	Rp 110.000.000	10%	Rp 150.000.000	15%	Rp 186.000.000	20%	Rp 190.000.000	25%	Rp 200.000.000
7.12	Pelatihan bidang Photography	Terlaksananya pelatihan dibidang photography	5%	Rp 92.000.000	10%	Rp 67.500.000	15%	Rp 205.000.000	20%	Rp 245.000.000	25%	Rp 345.000.000
7.13	Pelatihan bidang Tulisan berita	Terlaksananya pelatihan bidang tulisan berita	5%	Rp 72.000.000	10%	Rp 295.000.000	15%		20%		25%	
7.14	Diskusi pendalaman tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Terlaksananya diskusi pendalaman tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	5%	Rp 78.000.000	10%	Rp 82.000.000	15%	Rp 89.500.000	20%	Rp 93.000.000	25%	Rp 100.000.000
7.15	Pelatihan tentang teknik penulisan berita yang baik dan benar	Terlaksananya pelatihan tentang teknik penulisan berita yang baik dan benar	5%	Rp 64.000.000	10%	Rp 88.000.000	15%	Rp 92.000.000	20%	Rp 100.000.000	25%	Rp 121.000.000
7.16	Pendidikan tentang penulisan Artikel	Terlaksananya pendidika tentang penulisan artikel	5%	Rp 42.000.000	10%	Rp 52.000.000	15%	Rp 625.000.000	20%	Rp 750.000.000	25%	Rp 860.000.000
7.17	Pelatihan bidang videography	Terlaksananya pelatihan bidang vidiography	5%	Rp 46.000.000	10%	Rp 56.000.000	15%	Rp 64.000.000	20%	Rp 76.000.000	25%	Rp 86.000.000
7.18	Lomba Hacker se-Pulau Nias	Terlaksananya lomba Hacker se-Pulau Nias	5%	Rp 178.000.000	10%	Rp 195.000.000	15%	Rp 215.000.000	20%	Rp 256.700.000	25%	Rp 300.000.000
7.19	Pelatihan dan seminar Aplikasi open sourcE	Adanya pelatihan dan seminar aplikasi open sourcE	5%	Rp 170.000.000	10%	Rp 178.000.000	35%	Rp 290.000.000	20%	Rp 325.000.000	25%	Rp 390.000.000
7.20	Penyusunan sistem informasi data elektronik	Tersusunnya sistem informasi data elektronik	5%	Rp 246.000.000	10%	Rp 258.000.000	35%	Rp 287.000.000	20%	Rp 321.000.000	25%	Rp 356.000.000
7.21	Lomba design website	Terlaksananya lomba design website	5%	Rp 182.400.000	10%	Rp 193.250.000	35%	Rp 250.000.000	20%	Rp 321.000.000	25%	Rp 358.000.000

8	Kerjasama Informasi dengan Media Ma	tersedianya informasi kepada masyarakat melalui media Radio & tivi, selebaran, baliho spanduk, dialog interaktif, pameran dan media cetak.		Rp 3.266.300.000		Rp 4.916.056.000		Rp 6.015.800.000		Rp 7.062.000.000		Rp 9.186.000.000
8.1	Penyebarluasan Informasi melalui media cetak	Kerjasama dengan media cetak	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 295.000.000	1 Tahun	Rp 345.000.000	1 Tahun	Rp 390.000.000	1 Tahun	Rp 440.000.000
8.2	Penyebarluasan Informasi melalui media Elektronik (radio dan televisi)	Pidato, talkshow & liputan kegiatan Bupati melalui Radio & televisi TVRI Medan	1 Tahun	Rp 190.000.000	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 345.000.000	1 Tahun	Rp 405.000.000	1 Tahun	Rp 460.000.000
8.3	Penyebarluasan Informasi melalui selebaran (brosur & leaflet)	Tersedianya brosur, boklet, Poster & leaflet	1 Tahun	Rp 189.000.000	1 Tahun	Rp 260.000.000	1 Tahun	Rp 331.000.000	1 Tahun	Rp 402.000.000	1 Tahun	Rp 477.000.000
8.4	Penyebarluasan informasi melalui media luar baliho dan spanduk	Tersedianya baliho, Spanduk, back drop, bendo, standing banner dan rollbanner	1 Tahun	Rp 190.000.000	1 Tahun	Rp 235.000.000	1 Tahun	Rp 345.000.000	1 Tahun	Rp 450.000.000	1 Tahun	Rp 505.000.000
8.5	Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah dan tatap muka	Penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang bersifat penyuluhan	1 Tahun	Rp 160.000.000	1 Tahun	Rp 190.000.000	1 Tahun	Rp 220.000.000	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 280.000.000
8.6	Penyebarluasan informasi melalui media Pameran	Terselenggaranya pameran pada PRSU pameran IT EXPO dan HUT Kab. Nias Barat 26 Mei Setiap tahunnya	1 Tahun	Rp 345.000.000	1 Tahun	Rp 450.000.000	1 Tahun	Rp 550.000.000	1 Tahun	Rp 650.000.000	1 Tahun	Rp 750.000.000
8.7	Penyebarluasan Informasi melalui Event-Event Hari Besar	Terselenggaranya pawai dengan menggunakan Mobil Hias	1 Tahun	Rp 210.000.000	1 Tahun	Rp 276.000.000	1 Tahun	Rp 342.000.000	1 Tahun	Rp 408.000.000	1 Tahun	Rp 474.000.000
8.8	Penyebarluasan Informasi melalui penerbitan tabloid HASAMBUA	Tersedianya Tabloid Nias Barat (HASAMBUA)	1 Tahun	Rp 150.000.000	1 Tahun	Rp 250.000.000	1 Tahun	Rp 345.000.000	1 Tahun	Rp 650.000.000	1 Tahun	Rp 750.000.000
8.9	Penyebarluasan Informasi melalui vcd/dvd informasi	Tersedianya informasi melalui pemutaran film Vcd/Dvd	1 Tahun	Rp 76.000.000	1 Tahun	Rp 90.000.000	1 Tahun	Rp 106.000.000	1 Tahun	Rp 121.000.000	1 Tahun	Rp 136.000.000
8.10	Penyebarluasan Informasi melalui Mobil Siaran Informasi	tersedianya Informasi melalui Mobil Siaran Informasi keiling	1 Tahun	Rp 75.000.000	1 Tahun	Rp 90.000.000	1 Tahun	Rp 106.000.000	1 Tahun	Rp 121.000.000	1 Tahun	Rp 136.000.000
8.11	Mengikuti Pekan Informasi Masyarakat/pekan informasi Nasional	Terjadi Pertukaran Informasi Masyarakat dan Pengenalan Informasi Melalui Pekan Informasi Daerah dan Nasional	1 Tahun	Rp 235.000.000	1 Tahun	Rp 450.000.000	1 Tahun	Rp 665.000.000	1 Tahun	Rp 650.000.000	1 Tahun	Rp 890.000.000
8.12	Operasionalisasi Hari Pers Nasional	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pers Nasional & HUT PWI Tingkat Provinsi Sumatera Utara tingkat kabupaten Nias Barat	1 Tahun	Rp 120.000.000	1 Tahun	Rp 156.000.000	1 Tahun	Rp 185.000.000	1 Tahun	Rp 220.000.000	1 Tahun	Rp 235.000.000
8.13	Dialog Pembangunan Nias Barat	Terlaksananya Dialog Pembangunan Nias Barat	1 Tahun	Rp 62.000.000	1 Tahun	Rp 72.000.000	1 Tahun	Rp 82.000.000	1 Tahun	Rp 92.000.000	1 Tahun	Rp 102.000.000
8.14	Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Nias Barat dan Nasional	Adanya Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Nias Barat dan Nasional	1 Tahun	Rp 136.000.000	1 Tahun	Rp 146.000.000	1 Tahun	Rp 156.000.000	1 Tahun	Rp 166.000.000	1 Tahun	Rp 176.000.000
8.15	Talkshow Nias Barat membangun di radio RRI Gunungsitoli	Terlaksananya Talkshow Nias Barat Membangun di Radio RRI Gunungsitoli	1 Tahun	Rp 63.000.000	1 Tahun	Rp 68.000.000	1 Tahun	Rp 73.000.000	1 Tahun	Rp 78.000.000	1 Tahun	Rp 83.000.000
8.16	Talkshow dalam Rangka HUT Kabupaten Nias Barat di Radio RRI setiap Mei	Terlaksananya Talkshow dalam rangka HUT RRI Kabupaten Nias Barat	1 Tahun	Rp 65.000.000	1 Tahun	Rp 69.000.000	1 Tahun	Rp 73.000.000	1 Tahun	Rp 77.000.000	1 Tahun	Rp 82.000.000
8.17	Program Talkshow Prioritas APBD T.A 2018 Nias Barat	Terlaksananya Talkshow Program Prioritas APBD T.A 2018 Nias Barat	1 Tahun	Rp 68.000.000	1 Tahun	Rp 72.000.000	1 Tahun	Rp 76.000.000	1 Tahun	Rp 80.000.000	1 Tahun	Rp 84.000.000
8.18	Pergelaran pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Terlaksananya Pergelaran pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	1 Tahun	Rp 167.600.000	1 Tahun	Rp 188.900.000	1 Tahun	Rp 201.900.000	1 Tahun	Rp 214.000.000	1 Tahun	Rp 227.000.000
8.19	Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional(Metra) di Kabupaten Nias Barat	Tersosialisasinya Pemberdayaan kelompok Media Tradisional (Metra) di Kabupaten Nias Barat	1 Tahun	Rp 98.000.000	1 Tahun	Rp 105.000.000	1 Tahun	Rp 112.000.000	1 Tahun	Rp 119.000.000	1 Tahun	Rp 130.000.000

8.20	Pameran/Teknologi Tempat Guna (TTG)	Adanya pameran /Expo Teknoligi Informasi	1 Tahun	Rp 180.000.000	1 Tahun	Rp 212.000.000	1 Tahun	Rp 243.000.000	1 Tahun	Rp 276.000.000	1 Tahun	Rp 308.000.000
8.21	Sosialisasi Pemilihan Lagislastif Tahun 2019	Tersosialisasinya Pemilihan Lagislastif Tahun 2019	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 87.000.000	1 Tahun	Rp 92.000.000	1 Tahun	Rp 107.000.000	1 Tahun	Rp 1.109.000.000
8.22	Sosialisasi Pemilihan Presiden Tahun 2021	Tersosialisasinya Pemilihan Presiden Tahun 2021	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 86.000.000	1 Tahun	Rp 91.000.000	1 Tahun	Rp 96.000.000	1 Tahun	Rp 106.000.000
8.23	Rapat Koordinator KIM	Adanya Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat	1 Tahun	Rp 48.000.000	1 Tahun	Rp 54.000.000	1 Tahun	Rp 62.000.000	1 Tahun	Rp 68.000.000	1 Tahun	Rp 74.000.000
8.24	Talkshow Dalam Rangka Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2019	Terlaksananya Talkshow Dalam Rangka Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2019	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 62.000.000	1 Tahun	Rp 78.000.000	1 Tahun	Rp 84.000.000	1 Tahun	Rp 92.000.000
8.25	Talkshow Dalam Rangka Pemilih Dalam Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2019	Terlaksananya Talkshow Dalam Rangka Pemilih Dalam Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2019	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 62.000.000	1 Tahun	Rp 67.000.000	1 Tahun	Rp 72.000.000	1 Tahun	Rp 77.000.000
8.26	Talkshow Dalam Rangka Pemilih Dan Pemula dalam Pemilu Legislatif	Terlaksananya Talkshow Dalam Rangka Pemilih Dan Pemula dalam Pemilu Legislatif	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 62.000.000	1 Tahun	Rp 67.000.000	1 Tahun	Rp 72.000.000	1 Tahun	Rp 77.000.000
8.27	Rapat Koordinasi Dengan Mitra Kerja Media Masa Postel, Asosiasi, Provider, dan Organisasi Radio Lainnya	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Mitra Kerja Media Masa Postel, Asosiasi, Provider, dan Organisasi Radio Lainnya	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 126.756.000	1 Tahun	Rp 152.000.000	1 Tahun	Rp 172.000.000	1 Tahun	Rp 198.000.000
8.28	Sosialisasi Master Plan Frekuensi Radio Nias Barat	Tersosialisasinya Master Plan Frekuensi Radio Nias Barat	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 84.900.000	1 Tahun	Rp 95.900.000	1 Tahun	Rp 101.000.000	1 Tahun	Rp 106.000.000
8.29	Pembinaan Media Masa	Adanya Pembinaan Media Masa	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 76.000.000	1 Tahun	Rp 86.000.000	1 Tahun	Rp 96.000.000	1 Tahun	Rp 106.000.000
8.30	Lomba Karya Tulis/Lomba Foto Dalam Rangka Hari Jadi Nias Barat 26 Mei	Terlaksananya Lomba Karya Tulis/Lomba Foto Dalam Rangka Hari Jadi Nias Barat 26 Mei	1 Tahun	Rp 136.700.000	1 Tahun	Rp 148.500.000	1 Tahun	Rp 160.000.000	1 Tahun	Rp 172.000.000	1 Tahun	Rp 184.000.000
8.31	Peliputan Pemilu Legislatif 2019	Terlaksananya Peliputan Pemilu Legislatif 2019	1 Tahun	-	1 Tahun	Rp 78.000.000	1 Tahun	Rp 88.000.000	1 Tahun	Rp 98.000.000	1 Tahun	Rp 112.000.000
8.32	Coffee Morning dan Konfrensi Pers dengan Media	Terlaksananya Coffee Morning dan Konfrensi Pers dengan Media	1 Tahun	Rp 52.000.000	1 Tahun	Rp 64.000.000	1 Tahun	Rp 75.000.000	1 Tahun	Rp 105.000.000	1 Tahun	Rp 220.000.000
9	Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki SDM yang Baik		Rp 4.621.733.000		Rp 5.865.250.000		Rp 7.038.267.000		Rp 7.895.267.000		Rp 8.091.055.000
9.1	Pembentukan pembinaan, perlombaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Terselenggaranya pembinaan, perlombaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM)	1 org	Rp 185.000.000	3 org	Rp 230.000.000	5 org	Rp 275.000.000	7 org	Rp 315.000.000	8 org	Rp 345.000.000
9.2	Bimtek Budaya Dokumentasi dan sertifikat bagian ASN Pemkab Nias Barat	Terselenggaranya Bimtek pengelolaan Dokumentasi , bagi Pegawai Dinas Kominfo dan SKPD lain yang menangani pendokumentasian	30 org	Rp 198.000.000	40 org	Rp 250.000.000	50 org	Rp 302.000.000	60 org	Rp 348.000.000	70 org	Rp 400.000.000
9.3	Bimtek literasi TIK bagi kalangan Wanita	Terselenggaranya Bimtek literasi TIK pengenalan teknologi bagi kalangan Wanita	30 org	Rp 165.000.000	40 org	Rp 175.000.000	50 org	Rp 350.000.000	3 org	Rp 300.000.000	40%	Rp 120.000.000
9.4	Pembinaan dan pengembangan Bakohumas	Terselenggaranya rapat-rapat dan muayawarah tentang pengembangan bkohumas	10 org	Rp 88.500.000	15 org	Rp 96.250.000	20 org	Rp 104.500.000	25 org	Rp 112.000.000	30%	Rp 125.000.000
9.5	Pembentukan, sosialisasi pembinaan dan operasionalisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Terselenggaranya Pembentukan, sosialisasi pembinaan dan operasionalisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	50 org	Rp 195.000.000	60 org	Rp 184.500.000	70 org	Rp 175.000.000	80 org	Rp 160.000.000	90 org	Rp 145.000.000
9.6	Pembinaan dan pengembangan kelompok pertunjukkan rakyat	Terlaksananya Penyelenggara kelompok pertunjukkan rakyat (Pertuntra)	1 org	Rp 296.000.000	6 org	Rp 305.500.000	10 org	Rp 314.500.000	15 org	Rp 325.000.000	20 org	Rp 335.000.000
9.7	Pemberian pelatihan edukasi TIK bagi masyarakat (TIK untuk pemasaran, TIK untuk pendidikan, TIK untuk keluarga, TIK untuk aktivitas sosial).	Terlaksana Pelatihan, bimbingan teknis pemanfaatan TIK kepada masyarakat kab. Nias Barat	20 org	Rp 185.000.000	8 org	Rp 225.000.000	10 org	Rp 265.000.000	12 org	Rp 305.000.000	15 org	Rp 345.000.000

9.8	Fasilitas Bimtek dan Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCI0)	Terselenggaranya penerapan eGovernment yang baik melalui peningkatan jumlah aparatur yang sudah terlatih dan bersertifikasi Government Chief Information Officer (GCI0)	4 Org	Rp 295.000.000	15 org	Rp 310.000.000	20 Org	Rp 315.000.000	25 Org	Rp 330.000.000	30 org	Rp 345.000.000
-----	--	---	-------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------

9.9	Pelatihan peningkatan Kompetensi ASN berbasis aplikasi dan data base	Terselenggaranya penerapan SDM IT Dinas Kominfo dan SKPD lainnya untuk aplikasi dan data base	10 org	Rp 250.000.000	8 org	Rp 480.000.000	7 org	Rp 710.000.000	6 org	Rp 940.000.000	5 org	Rp 1.170.000.000
9.10	Pelatihan peningkatan Kompetensi ASN Bidang perencanaan strategis dan manajemen project IT	Adanya SDM ASN Dinas Kominfo dan SKPD Pemkab Nias Barat yang bersertifikat project management IT	5 org	Rp 235.000.000	10 org	Rp 300.000.000	15 org	Rp 360.000.000	20 org	Rp 415.000.000	25 org	Rp 475.000.000
9.11	Pelatihan peningkatan Kompetensi ASN Bidang TIK eGovernment , open source dan keamanan data.	Terselenggaranya pelatiba sertifikat bagi ASN dalam pemamfaatan eGovernment , dan pengaman data	6 org	Rp 310.000.000	12 org	Rp 460.000.000	18 org	Rp 510.000.000	24 org	Rp 560.000.000	30 org	Rp 620.000.000
9.12	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang teknologi informasi dan komunikasi	terlaksana sosialisasi peraturan bagi aparatur dan masyarakat pada pengguna IT	100 org	Rp 275.000.000	40 org	Rp 280.000.000	30 org	Rp 285.000.000	25 org	Rp 290.000.000	20 org	Rp 295.000.000
9.13	Bimtek peraturan perundang-undangan bidang bidang pengelolaan TIK dan e-Government	terlaksana Bimtek pengenalan kebijakan ,peraturan bagi pengelola eGovernment di setiap SKPD dan Stake holder	30 org	Rp 120.000.000	6 org	Rp 150.000.000	12 org	Rp 180.000.000	18 org	Rp 110.000.000	25 org	Rp 140.000.000
9.14	Bimtek kajian Pos dan Telekomunikasi	terlaksana sosialisasi tentang nkebijakan bidang pos dan telekomunikasi kepada apratur, masyarakat dan dunia usaha	5 org	Rp 140.000.000	8 org	Rp 135.000.000	7 org	Rp 130.000.000	6 org	Rp 125.000.000	5 org	Rp 120.000.000
9.15	Pelatihan SDM Aparatur pemerintah bidang tata kelola IT Pemerintah	Adanya personil ASN Pekab Nias Barat yang mampu menangani tata kelola IT Pemerintah	4 org	Rp 220.000.000	6 org	Rp 270.000.000	8 org	Rp 320.000.000	10 org	Rp 370.000.000	12 org	Rp 42.000.000
9.16	Sosialisasi Pengguna internet Cerdas, sehat , produktif (inckap) kepada masyarakat	Terselenggara sosialisasi penngguna internet cerdas, sehat dan produktif (incakap) kepad siswa dan dunia usaha	80 org	Rp 180.000.000	100 org	Rp 220.000.000	115 org	Rp 260.000.000	120 org	Rp 300.000.000	125 org	Rp 340.000.000
9.17	Pengkajian dan pengembangan Sistem informasi	Tersedianya kajian akademis dan audiet sistem informasi di Pemkab Nias Barat	5%	Rp 90.000.000	10%	Rp 150.000.000	15%	Rp 210.000.000	20%	Rp 270.000.000	25%	Rp 330.000.000
9.18	Pelatihan dan sertifikasi Nasional Aparatur SDM IT Dinas Kominfo Cisco Certified Network Associte (CSNA) Cisco Certified Network Profesional (CSNP) Cisco Certified Inter NetworkProfesional (CSINP)	Adanya aparatur Bidang IT Yang bersertifikat Cisco Network	5 org	Rp 113.733.000	10 org	Rp 204.000.000	15 org	Rp 294.267.000	20 org	Rp 388.267.000	25 org	Rp 489.000.000
9.19	Pelatihan dan sertifikasi Nasional Aparatur SDM IT Dinas Kominfo Bidang microtik dasar dan mahir (MTCNA, MTCINE, MTCUME)	Adanya aparatur Bidang IT Yang bersertifikat microtik dengan berbagai jenjang	7 org	Rp 355.000.000	10 org	Rp 475.000.000	12 org	Rp 550.000.000	15 org	Rp 640.000.000	18 org	Rp 765.000.000
9.20	Pelatihan dan sertifikasi Nasional Aparatur SDM IT Dinas Kominfo Bidang Redhard Certified system administraor Redhard Certified system enggineer	Adanya aparatur Bidang IT Yang bersertifikat sebagai system administraor jaringan berbasis linux	7 org	Rp 256.000.000	10 org	Rp 355.000.000	12 org	Rp 450.000.000	15 org	Rp 550.000.000	18 org	Rp 640.000.000
9.21	Pelatihan dan sertifikasi Nasional Aparatur pengelola Database Certified system administrator (DBA) setiapSKPD	Tersedianya SDM aparatur yang bersertifikat sebagai database administrator pada beberapa SKPD	5 org	Rp 275.000.000	10 org	Rp 325.000.000	15 org	Rp 375.000.000	20 org	Rp 420.000.000	25 org	Rp 475.000.000
9.22	PelatihaN Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Meningkatnya SDM Tentang Tata Naskah dinas	2 kali	Rp 80.000.000	2 kali	Rp 96.000.000	2 kali	Rp 112.000.000	2kali	Rp 128.000.000	2 kali	Rp 144.000.000
9.23	Pelatihan pembuatan website	Meningkatnya SDM aparatur dalam pembuatan website	1 tahun	Rp 114.500.000	1 tahun	Rp 189.000.000	1 Tahun	Rp 191.000.000	1 Tahun	Rp 194.000.000	1 Tahun	Rp 196.555.000
10	Program Peningkatan Pengelolaan Persandian			Rp 2.870.000.000		Rp 3.434.000.000		Rp 3.774.000.000		Rp 4.244.000.000		Rp 6.907.000.000
10.1	Penyusunan masterplan penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi	Tersedianya panduan jangka menengah pengembangan sistem Pemkab Nias Barat	5%	Rp 200.000.000	10%	Rp 220.000.000	15%	Rp 240.000.000	20%	Rp 260.000.000	25%	Rp 280.000.000
10.2	Pembuatan produk hukum pengelolaan persansian daerah	Adanya regulasi yang mengatur tata kelola persandian di Kab. Nias barat	5%	Rp 295.000.000	10%	Rp 350.000.000	15%	Rp 395.000.000	20%	Rp 440.000.000	25%	Rp 490.000.000
10.3	Pengelolaan dan perlindungan informasi	mingkatkanpengelola informasi dan komunikasi pemerintah daerah	5%	Rp 145.000.000	10%	Rp 176.000.000	15%	Rp 106.000.000	20%	Rp 142.000.000	25%	Rp 175.000.000

10.4	Pengadaan perangkat keras sandi dan jaringan komunikasi		3%	Rp 450.000.000	7%	Rp 500.000.000	15%	Rp 550.000.000	20%	Rp 600.000.000	25%	Rp 650.000.000
10.5	Pengadaan perangkat lunak persandian	Tersedianya perangkat lunak untuk konfigurasi perangkat persandian	3%	Rp 280.000.000	7%	Rp 290.000.000	12%	Rp 300.000.000	18%	Rp 310.000.000	22%	Rp 320.000.000

10.6	Pengamanan terhadap kegiatan / aset fasilitas /instalasi/dengan metode persandian	Terlaksana pengamananaset dengan metode persandian	3%	Rp 128.000.000	5%	Rp 165.000.000	8%	Rp 202.000.000	12%	Rp 239.000.000	15%	Rp 276.000.000
10.7	operasional tata penyusunan tata kelola persandian	Tersedianya biaya operasional kegiatan pengelolaan persandian di Kab. Nias Barat	3%	Rp 167.000.000	6%	Rp 197.000.000	10%	Rp 217.000.000	15%	Rp 237.000.000	20%	Rp 2.570.000.000
10.8	Penyusunan kebijakan, peraturan teknis operasinal persandian untuk pengamanan informasi	Adanya peraturan, kebijakan operasional pengelolaan persandian di daerah	3%	Rp 197.000.000	5%	Rp 206.000.000	8%	Rp 212.000.000	12%	Rp 221.000.000	15%	Rp 130.000.000
10.9	Sosialisasi kesadaran informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui workshop,bimtek dan seminar.	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi kesadaran informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui workshop,bimtek dan seminar.	5%	Rp 235.000.000	10%	Rp 350.000.000	15%	Rp 365.000.000	20%	Rp 380.000.000	25%	Rp 395.000.000
10.10	Pemeliharaan dan perbaikan perangkat persandian	Tersedia operasional pemeliharaan perangkat persandian daerah	5%	Rp 300.000.000	10%	Rp 350.000.000	15%	Rp 400.000.000	20%	Rp 450.000.000	25%	Rp 500.000.000
10.11	Operasional fungsional umum persandian	Tersedianya biaya operasional honor, tunjangan khusus sandiman (petugas sandi)	5%	Rp 189.000.000	8%	Rp 263.000.000	15%	Rp 337.000.000	18%	Rp 412.000.000	20%	Rp 485.000.000
10.12	Peningkatan dan pengembangan SDM sandi melalui workshop, diklat, pelatihan dan bimtek sandi	Meningkatkan jumlah personil dan kualitas personil pengelola persandian di daerah untuk pengamanan informasi dan komunikasi	3%	Rp 284.000.000	5%	Rp 367.000.000	10%	Rp 450.000.000	15%	Rp 553.000.000	20%	Rp 636.000.000
11	Program pengembangan data / informasi			Rp 801.000.000		Rp 881.500.000		Rp 1.240.500.000		Rp 1.067.000.000		Rp 1.162.000.000
11.1	Penyusunan BUku Nias Barat dalam angka Tahun 2016	Tersedianya buku hasil analisis isu publik dan buku hasil analis feedback terhadap kegiatan-kegiatan Pemkab Nias Barat yang berasal dari media cetak	1 paket	Rp 85.000.000	1 paket	Rp 93.000.000	1 paket	Rp 101.000.000	1 paket	Rp 108.000.000	1 paket	Rp 115.000.000
11.2	Penyusunan Buku PDBRD kabupaten Nias Barat Tahun 2016	Tersedianya Buku PDRB	1 paket	Rp 75.000.000	1 paket	Rp 82.500.000	1 paket	Rp 94.000.000	1 paket	Rp 106.000.000	1 paket	Rp 118.000.000
11.3	Penyusunan Buku IKK Kabupaten Nias Barat Tahun 2015	Tersedianya buku IKK Kabupaten Nias Barat Tahun 2016	1 paket	Rp 75.000.000	1 paket	Rp 82.500.000	1 paket	Rp 94.000.000	1 paket	Rp 106.000.000	1 paket	Rp 118.000.000
11.4	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana	Tersedianya Buku IPM Kabupaten Nias Barat tahun 2016	1 paket	Rp 75.000.000	1 paket	Rp 82.500.000	1 paket	Rp 94.000.000	1 paket	Rp 106.000.000	1 paket	Rp 118.000.000
11.5	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data informasi kawasan rawan bencana	1 paket	Rp 225.000.000	1 paket	Rp 247.500.000	1 paket	Rp 269.000.000	1 paket	Rp 296.000.000	1 paket	Rp 320.000.000
11.6	Penyusunan dan Analisis data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Tersedianya data Informasi kebutuhan penyusunan perencanaan dan pengembangan	5%	Rp 25.000.000	10%	Rp 27.500.000	15%	Rp 300.000.000	20%	Rp 32.500.000	25%	Rp 35.000.000
11.7	Pengumpulan/updating dan processing data Informasi internal dan ekstenal	Tersedianya Pengumpulan/updating dan processing data Informasi internal dan ekstenal	1 Paket	Rp 176.000.000	1 Paket	Rp 190.000.000	1 paket	Rp 204.000.000	1 paket	Rp 218.000.000	1 paket	Rp 232.000.000
11.8	Program pengembangan data/informasi/statistik/daerah	Tersedianya data informasi statistik daerah yang up to date dan mudah di akses oleh pengguna dan masyarakat	5%	Rp 65.000.000	10%	Rp 76.000.000	15%	Rp 84.500.000	20%	Rp 94.500.000	25%	Rp 106.000.000
JUMLAH				Rp 52.046.871.320		Rp 56.524.976.000		Rp 56.334.470.000		Rp 70.979.387.000		Rp 73.732.545.000

Lahomi, 24 September 2016

Menyetujui

Di ketahui/disetujui Oleh :

Rincian program / kegiatan diusulkan oleh

Kepala Dinas Perhubungan

Ka.Bid Komunikasi dan Informatika

Kasi Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika

Komunikasi dan Informatika

HAOGOARO GULO, S.AP
Pembina TK.I

NIP. 19590305 1988203 1 009

Arif Arif Domo,SE
NIP. 19760521 200112 1 003

Solifati Gulo,S.Kom.,MM
NIP. 19760915 201001 1 016

Menyetujui
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika

HAOGOARO GULO, S.AP
Pembina TK.I
NIP. 19590305 1988203 1 009

Di ketahui/disetujui Oleh :
Ka.Bid Komunikasi dan Informatika

Arlis Arif Domo,SE
NIP. 19760521 200112 1 003